PENGARUH KEBIJAKAN HUTANG, PROFITABILITAS, DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

(Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2014-2019)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memperoleh Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam
Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh:

AFIYATUL KHAFIFAH

NIM 1705046066

PROGRAM STUDI AKUTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Afiyatul Khafifah

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudari :

Nama : Afiyatul Khafifah

NIM : 1705046066

Judul Skripsi : Pengaruh Kebijakan Hutang, Profitabilitas Dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2014-2019)

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Desember 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ari Kristin P., SE., M. Si	**Warno, SE., M. Si**
NIP. 19790512 200501 2 004	**NIP. 19830721 201503 1 002**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. /Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama	: Afiyatul Khafifah
NIM	: 1705046066
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah
Judul Skripsi	: Pengaruh Kebijakan Hutang, Profitabilitas Dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2014-2019)

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 21 Desember 2020.

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Akuntansi Syariah.

Semarang, 21 Desember 2020

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. Ratno Agriyanto, M. Si., Akt
NIP. 198000128 200801 1 010

Sekretaris Sidang

Warno, SE., M.Si.
NIP. 19830721 201503 1 002

Penguji I

Rahman Eljunusi, S.E., M.M.
NIP. 19691118 200003 1 001

Penguji II

Dr. Ratno Agriyanto, M. Si., Akt
NIP. 198000128 200801 1 010

Pembimbing I

Dr. Ari Kristin P., SE., M. Si
NIP. 19790512 200501 2 004

Pembimbing II

Warno, SE., M.Si.
NIP. 19830721 201503 1 002

MOTTO

Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan.

-Tom Bodett-

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Dengan terselesaikan skripsi ini, maka penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta doa yang diberikan sepanjang waktu.
2. Bapak K. H. Abrori selaku pengasuh Ponpes Roudlotul Muta'alimin yang telah mendoakan dan memberikan motivasi.
3. Teman-teman PPRM yang telah memberikan semangat dan dukungan.
4. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah angkatan 2017, serta Almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
5. Teman-teman KKN RDR 75 (Posko 127) yang telah memberikan semangat dan banyak pengalaman selama 45 hari.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kehadirat Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amiin.

Temanggung, Desember 2020

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 08 Desember 2020

Deklarator

Afiyatul Khafifah

1705046066

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

َ = a

ِ = i

ُ = u

C. Diftong

اَيْ = ay

اَوْ = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misal الطبّ al-thibb.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan al-... misalnya الصناعة = al-shina ‘ah. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbuthah (ة)

Setiap ta' marbuthah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = al-ma'isyah al-thabi'iyyah.

ABSTRACT

Taxes are mandatory contributions to the state from individuals or entities and are used for the state's needs for the welfare of the people. Tax revenue in Indonesia has not met the target, seen from the revenue in 2019 which was only realized 84.4%. One of the causes is low tax revenue from corporate or corporate taxes, such as mining sector companies which grew by minus 19% in 2019 and one of them is due to tax agressiveness. The factors that influence tax aggressiveness in this study are debt policy, profitability and disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR).

The purpose of this study was to determine the effect of debt policy, profitability and disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) on tax agressiveness. This type of research is quantitative research. The population in this study are mining companies listed on the Indonesian Sharia Stock Indeks (ISSI) for the 2014-2019 period. The sample used purposive sampling method obtained by 6 companies. The data analysis technique uses multiple linear regression assisted by the SPSS 19 application.

Based on the results of multiple linear regression analysis, the results show that (1) debt policy (DAR) has a significant negative effect on tax aggressiveness, (2) profitability (ROA) has a significant negative effect on tax aggressiveness, and (3) disclosureof Corporate Social Responsibility (CSR) has an effect significant negative towards tax agressiveness.

Keywords*: Debt Policy, Profitability, Corporate Social Responsibility (CSR), Tax Aggressiveness.*

ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi wajib untuk negara dari orang pribadi atau badan dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak di Indonesia belum memenuhi target, dilihat dari perolehan tahun 2019 yang hanya terealisasikan 84,4%. Salah satu penyebabnya yaitu penerimaan pajak yang rendah dari pajak badan atau perusahaan, seperti halnya perusahaan sektor pertambangan yang tumbuh minus 19% ditahun 2019 dan salah satunya disebabkan karena terjadi tindakan agresivitas pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dalam penelitian ini adalah kebijakan hutang, profitabilitas dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang, profitabilitas dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2014-2019. Sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang diperoleh 6 perusahaan. Tehnik analisis data menggunakan regresi linear berganda dibantu dengan aplikasi SPSS 19.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil bahwa (1) kebijakan hutang (DAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, (2) profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, dan (3) pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: Kebijakan Hutang, Profitabilitas, Corporate Social Responsibility (CSR), Agresivitas Pajak.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas skripsi yang berjudul: **"Pengaruh Kebijakan Hutang, Profitabilitas Dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak" (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2014 – 2019).** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Imam Yahya, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA., CPAI selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah yang telah memberikan motivasi serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, SE., M. Si selaku dosen pembimbing I atas bimbingannya dengan sabar serta memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Warno, SE., M. Si selaku dosen pembimbing II serta Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah yang telah memberikan motivasi, dan juga yang bersedia meluangkan waktu, membimbing dengan sabar serta mengoreksi dalam pengerjaan skripsi.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingan selama penulis menempuh studi belajar.

7. Semua teman-teman seperjuangan jurusan Akuntansi Syariah yang telah memberikan motivasi dan pelajaran yang berharga.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki skripsi ini. Semoga dengan skripsi ini memberikan manfaat tersendiri bagi penulis maupun bagi pembaca.

Semarang, 08 Desember 2020

Afiyatul Khafifah

NIM. 1705046066

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **3**

MOTTO ..... **iii**

PERSEMBAHAN ..... **iv**

DEKLARASI ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN ..... **vi**

ABSTRACT ..... **viii**

ABSTRAK ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 11

1.3 Tujuan Penelitian 12

1.4 Manfaat Penelitian 12

1.5 Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**

2.1 Landasan Teori 14

2.1.1 Teori *Agensi* 14

2.1.2 Kebijakan Hutang 16

2.1.3 Profitabilitas 23

2.1.4 *Corporate Social Responsibility* (CSR) 28

2.1.5 Agresivitas Pajak 37

2.2 Penelitian Terdahulu 45

2.3 Kerangka Pemikiran 49

2.4 Hipotesis Penelitian 47

BAB III METODE PENELITIAN 54

3.1 Jenis Penelitian 54

3.2 Sumber Data 54

3.3 Populasi dan Sampel 55

3.4 Metode Pengumpulan data 56

3.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran 56

3.6 Tehnik Analisis Data 60

3.6.1 Statistik Deskriptif 60

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 61

3.6.2.1 Uji *Normalitas* 61

3.6.2.2 Uji *Multikolonieritas* 62

3.6.2.3 Uji *Autokorelasi* 63

3.6.2.4 Uji *Heteroskedastisitas* 63

3.6.3 Uji Hipotesis 64

3.6.3.1 Regresi Linear Berganda 64

3.6.3.2 Uji Koefisien determinan (R^2) 65

3.6.3.3 Uji Signifikan simultan (Uji F) 65

3.6.3.4 Uji Regresi Parsial *(*Uji Statistik t*)* 66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 67

4.1 Gambaran Umum 67

4.2 Deskripsi Data Penelitian 68

4.3 Uji Asumsi Klasik 70

4.3.1 Uji *Normalitas* 70

4.3.2 Uji *Multikolonieritas* 72

4.3.3 Uji *Autokorelasi* 73

4.3.4 Uji *Heteroskedastisitas* 73

4.4 Uji Hipotesis 75

4.4.1 Regresi Linear Berganda 75

4.4.2 Uji Koefisien Determinan 77

4.4.3 Uji Signifikan Simultan (Uji F) 77

4.4.4 Uji Regresi Parsial (Uji Statistik T) 78

4.4.5 Pembahasan Hasil Analisis Data 80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 86

5.1 Kesimpulan 86

5.2 Keterbatasan Penelitian 87

5.3 Saran 88

5.4 Penutup 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia 2
Tabel 2 Data Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di *ISSI* 67
Tabel 3 Uji Analisis Statistik Deskriptif 68
Tabel 4 Hasil Uji Normalitas 70
Tabel 5 Hasil Uji Multikolonieritas 72
Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi 73
Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas 74
Tabel 8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 75
Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinan 77
Tabel 10 Hasil Uji signifikan Simultan. 77
Tabel 11 Hasil Uji Regresi Parsial 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik P-P Plot..... 71
Gambar 2 Grafik Scatterplot..... 74

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak didefinisikan sebagai usaha yang dapat dilakukan untuk menggali sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan, karena di Indonesia sendiri pajak merupakan sumber penerimaan negara yang diletakkan diposisi teratas, sekitar 80 % sumber penerimaan negara berasal dari pajak. Tercantum dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1,yang menjelaskan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi yang wajib untuk negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan secara langsung tidak mendapatkan dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[1]

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memperhatikan pajak, yang bisa disebut sebagai tulang punggung dari penerimaan negara. Salah satu dari penyumbang kontribusi pajak di Indonesia yaitu perusahaan. Di Indonesia sendiri wajib pajak terdiri dari dua macam yaitu wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi dan wajib pajak oleh badan, sedangkan perusahaan termasuk dalam wajib pajak badan.

Di Indonesia telah banyak perusahaan dari berbagai macam sektor yang tergolong sebagai wajib pajak badan. Pajak dihitung dalam perusahaan dengan memperhatikan perolehan dari laba bersih yang terdapat di dalam laporan keuangan laba rugi yang diperoleh perusahaan. Pajak dibebankan kepada perusahaan semakin besar apabila penghasilan atau laba bersih yang diperoleh perusahaan juga semaki besar, begitupun sebaliknya. Apabila biaya pajak yang dibebankan kepada perusahaan semakin tinggi, maka dapat menimbulkan

[1]Haqi Fadillah Renny Selviani, Joko Supriyanto, "Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2017," *Akuntansi*, 2019, 1–15, h. 2.

tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu untuk meminimalkan beban pajak yang ditangguhkan..[2]

Pajak dikhawatirkan menjadi beban tersendiri bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba yang diperolehnya. Pemerintah dan perusahaan memiliki tujuan yang cenderung bertentangan, dimana dari pihak pemerintah mengharuskan supaya penerimaan negara terutama dari sektor pajak dapat mencapai maksimal, sedangkan dari pihak perusahaan menginginkan beban pajak yang sedikit supaya tujuan utama perusahaan dapat terpenuhi yaitu memperoleh laba yang besar guna untuk mensejahterakan pihak yang terlibat di dalam perusahaan dan agar kegiatan operasional perusahaan dapat meningkat sehingga kelangsungan hidup perusahaan semakin baik. [3]

Tabel 1

Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia 2014-2019

(dalam Triliyun Rupiah)

Tahun	**Target Penerimaan Pajak**	**Realisasi Penerimaan Pajak**	**Tingkat Pencapaian**
2014	Rp 1.246,1	Rp 1.143,3	91,6%
2015	RP 1.294,3	Rp 1.055,61	82%
2016	Rp 1.539,17	Rp 1.283,6	83,4%
2017	Rp 1.283	Rp 1.147	89,4%
2018	Rp 1.424	Rp 1.315,9	92%
2019	Rp 1.577,6	Rp 1.332,1	84,4%

Sumber: Kemenkeu RI

[2] Jessica and Agus Arianto Toly, "Pengaruh Pengungkapan Program Corporate Social Responsibility," *Tax & Accounting Review* 4, no. 1 (2014): 193–203, h. 96.

[3] Army Thesa Napitu and Christophorus Heni Kurniawan, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014," *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*, no. 2 (2016): 1–24, h. 3.

Kemenkeu (Kementrian Keuangan) RI menyatakan bahwa penerimaan pajak belum dapat terealisasikan dengan maksimal apabila dilihat dari target yang telah ditetapkan, dimana penerimaan pajak terhadap target pajak dari tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan, sedangkan tahun 2015 sampai 2018 presentasenya mengalami kenaikan. Akan tetapi, presentase pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga 7,6% dari tahun 2018. Dari tahun 2014 hingga 2019 realisasi penerimaan pajak yang paling sedikit terjadi pada tahun 2015 yaitu 82%, dan pada tahun 2018 merupakan perolehan pajak yang paling besar yaitu 92%.

Penerimaan Pajak yang ditetapkan di Indonesia selama ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah. Belum mampunya pemerintah dalam memaksimalkan realisasi penerimaan pajak yang sesuai dengan targetnya, maka menimbulkan sesuatu yang perlu dipertanyakan, yaitu apakah ada tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang dimulai dari melakukan penghindaran dalam pembayaran pajak dalam bentuk legal atau ilegal yang disebut dengan tindakan agresivitas pajak, atau pemungutan pajak yang sebenarnya belum dapat terlaksana secara baik dan maksimal.[4]

Agresivitas pajak biasanya disebut sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manajemen dengan tujuan untuk meminimalkan laba kena pajak dari perusahaan yang diperoleh melalui tindakan tax planning (perencanaan pajak) baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Dan hambatan dari pemungutan pajak diantaranya masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, kurangnya sosialisasi mengenai pajak dikalangan masyarakat, tingkat kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak menurun karena kondisi perekonomiannya, dan pajak yang seharusnya dipungut tidak dapat dipungut lagi karena terdapat wajib pajak yang menutup usahanya.[5]

---

[4] Nofia Umi Latifah, "Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak," *IAIN Surakarta*, no. 1 (2018), h. 2.

[5] *Ibid*., h. 7.

Tax is one of the sources of state revenues that is essential for the implementation and enhancement of national development that aims to improve the prosperity and welfare of the community. Since the tax reform was carried out with the introduction of the new tax law in 1983. Companies did the tax evasion as an attempt to avoid taxes by taking advantage of weaknesses iin the law without violating the established rules tp minimize the amount of tax payable.[6]

Secara finansial, adanya pembayaran pajak menjadikan pengeluaran perusahaan menjadi semakin besar sehingga memungkinkan dapat merugikan perusahaan. Sehingga perlu dilakukannya pengelolaaan yang baik supaya dengan adanya kewajiban untuk membayar pajak, pihak dari perusahaan tidak merasa dirugikan. Hal ini merupakan suatu strategi ataupun usaha yang perlu dilakukan dan merupakan tugas bagi perusahaan terutama pemimpinnya dan manajemen yang mengelola perusahaan. Penjelasan mengenai kepemimpinan yaitu terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوااتَّقُوْا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللهَ ۚ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌبِمَا تَعْمَلُوْنَ (18)

Atinya: *"Hai orang orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QA. Al-Hasyr: 18).*[7]

Makna dari ayat Al-Qur'an tersebut yaitu bahwa yang termasuk orang-orang beriman maka dia akan bertakwa kepada Allah, dan memperhatikan serta mempertimbangkan perbuatan yang akan dilakukannya dikemudian hari, karena Allah dapat melihat semua apa yang orang-orang kerjakan. Allah maha merencanakan yaitu sebagai perencana untuk semua makhluk-Nya. Maka dalam

---

[6] Imas Kismanah, Siti Masitoh, and Kimsen, "Profitability, Leverage, Sixe of Company Towards Tax Avoidance," *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* 4, no. 1 (2018): 29–36, h. 29.

[7] Ahmad Toha Putra, *Al-Quran Dan Terjemahannya (Transliterasi Arab-Latin) Model Kanan Kiri* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2012), h. 1242.

melakukan sebuah perencanaan atau perancangan sebelum berbuat sesuatu merupakan hal yang dicintai oleh Allah. Dalam perusahaan, perencanaan merupakan sesuatu yang berdampak besar bagi kelangsungan hidup perusahaan. Perencanaan yang lebih utama yaitu dilakukan oleh pemimpin atau manajernya. Pemimpin dapat dikatakan baik apabila pemimpin tersebut memiliki visi dan misi yang dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan supaya perusahaan dapat berjalan dan terkontrol dengan baik, begitu pula dengan manajernya.[8]

Dalam meminimalkan biaya pajak yang dilakukan perusahaan, yaitu dengan tindakan agresivitas pajak. Tindakan agresivitas pajak memberikan manfaat tersendiri bagi perusahaan yang melakukannya, akan tetapi disisi lain tindakan tersebut merugikan negara dan dapat menimbulkan penilaian negatif pada masyarakat terutama masyarakat sekitar perusahaan serta dapat mempengaruhi nama baik dan menurunkan reputasi perusahaan.[9]

Beberapa peneliti terdahulu melakukan penelitian tentang penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab dari munculnya agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan. Salah satunya, kebijakan hutang yang merupakan suatu kebijakan dari perusahaan mengenai penetapan atau penentuan seberapa banyak hutang yang diperlukan untuk membiayai kebutuhan perusahaan. Dimana perusahaan yang mengambil keputusan untuk melakukan kebijakan hutang yang besar maka dapat menurunkan performan serta nilai dari perusahaan tersebut, sehingga banyak pihak yang akan mengawasinya maka perusahaan tidak leluasa dalam mengatur perusahannya termasuk dalam pembuatan laporan keuangannya, sehingga perusahaan akan membuat laporan keuangan termasuk dalam membuat laporan perpajakan sesuai dengan keadaannya.

---

[8] Nur Amalia Sari, "Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi " *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2018, h. 23.

[9] Juniati Gunawan, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Akuntansi* 21, no. 3 (2017): 425, h.426.

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa kebijakan hutang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, dimana penelitian Hartadinata dan Heru Tjaraka (2016) menjelaskan bahwa kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, maka semakin tinggi kebijakan hutang semakin rendah agresivitas pajak.. Akan tetapi penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Irsan dan Suryani tahun 2018 dan Jeane tahun 2018 yang berpendapat bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak, maka semakin tinggi kebijakan hutang perusahaan maka semakin tinggi pula tindakan agresif dalam hal perpajakan

Faktor lainnya yaitu profitabilitas yang dapat didefinisikan sebagai rasio yang dapat mengetahui seberapa besar kemampuan dari perusahaan di dalam memperoleh laba. Laba yang dihasilkan perusahaan semakin besar, maka tingkat profitabilitas juga semakin tinggi (menyesuaikan besarnya laba). Apabila laba yang diperoleh perusahaan semakin besar, maka pajak yang semestinya dibebankan kepada perusahaan juga semakin banyak. Maka hal tersebut dapat mendorong pihak perusahaan untuk melakukan segala cara atau tindakan tax planning, dengan tujuan supaya dapat mengurangi besarnya biaya pajak yang ditangguhkan, karena perusahaan tetap berorientasi pada tujuan utamanya yaitu memperoleh laba yang besar. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan jika perusahaan dapat melakukan tindakan agresif terhadap pajak.[10]

Dalam penelitian yang dilakukan Sarjito dan Sari tahun 2016 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh siginifikan dan positif terhadap agresivitas pajak, maka diperoleh kesimpulan bahwa semakin tinggi laba yang didapat oleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggung, dan semakin jujur pula perusahaan untuk membayar pajaknya daripada yang berprofitabilitas rendah. Tetapi hasil penelitiannya ini

[10] Putu Prasista and Ery Setiawan, “Pengaruh Profitabilitas Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan,” *E-Jurnal Akuntansi* 17, no. 3 (2016): 2120–44, h. 43.

bertentangan dengan penelitiannya Risma tahun 2016 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, maksudnya jika perusahaan mempunyai keuntungan yang tinggi, maka beban pajak perusahaan yang akan dibayar dapat diminimalkan dan semakin sedikit.

Dalam melakukan operasionalnya, perusahaan tidak lepas dengan keberadaan lingkungan dan masyarakat disekitarnya. Maka selain perusahaan memenuhi kewajiban yang ditangguhkan oleh pemerintah, yaitu untuk membayar beban pajak yang digunakan sebagai pembangunan nasional demi kesejahteraan umum, perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab dalam hal sosial dan lingkungan sekitar. Tanggung jawab atas sosial dan lingkungan tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3), yang menjelaskan tentang Perseroan Terbatas (PT), bahwa PT mempunyai komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi negara yangg berguna untuk meningkatkan kuliatas kehidupan dan lingkungan supaya lebih bermanfaat, baik bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komitas yang terlibat, maupun masyarakat umum. Tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan kemudian dikenal dengan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).[11]

Pelaksanaan CSR memiliki tujuan agar hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar ataupun pemerintah terjalin dengan baik, karena adanya perusahaan dalam suatu negara juga merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Penerimaan pajak yang berkurang dapat disebabkan karena adanya agresivitas pajak, maka dapat menghambat usaha pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat sehingga tindakan agresivitas

[11] Ramila, Prima Aprilyani Rambe, and Sri Ruwanti, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak " *Jurnal Ekonomi UMRAH* 15, no. 2 (2016): 1–15, h. 239.

pajak dapat mencerminkan suatu aktivitas yang lepas tanggung jawab terhadap sosial.[12]

Perusahaan yang memiliki CSR yang tinggi akan memiliki citra yang baik, merk yang kuat, dan meningkatkan nilai perusahaan. Legitimasi positif dari masyarakat dapat diperoleh melalui kegiatan CSR dan patuh terhadap ketentuan pajak. Hal yang dilakukan perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat diantaranya menggunakan biaya CSR serta biaya pajak yang secara langsung maupun tidak langsung bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga perusahaan yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi, maka kurang agresif terhadap pajak dan begitu sebaliknya.[13]Melaksanakan kegiatan CSR dalam perusahaan merupakan suatu hal yang penting, terutama bagi perusahaan di sektor pertambangan. Karena banyak kasus yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan dengan keberadaan aktivitas perusahaan.

Sejauh ini ada beberapa penelitian yang menjelaskan tentang pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak, diantaranya yaitu penelitian oleh Elmi rakhma pada tahun 2018 yang menjelaskan bahwa CSR berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan CSR memiliki kecenderungan untuk melakukan agresivitas pajak, dan dapat dikatakan bahwa CSR digunakan oleh perusahaan untuk menyamar agresivitas pajak. Tetapi hasil tersebut berbeda dengan penelitian Fiona, Eni dan Andreas tahun 2017 serta Faridatul, Nurul, dan Anis tahun 2018 yang menjelaskan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, yaitu semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR maka semakin rendah tindakan agresivitas yang dilakukan.

---

[12]Gunawan, “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak', h. 429.

[13] Ayu Inayaturrohmah and Indriyana Puspitosari, “Pengaruh Maqashid Syariah Index, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak,” *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 98–115, h. 103.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan mencatat penerimaan pajak 2019 meleset dari target yaitu hanya terealisasi 84,4% (penerimaan pajaknya kurang 245 triliyun) dibanding tahun 2018 yang realisasinya mencapai 92%. Salah satu akibat dari penurunan tersebut ialah penerimaan pajak yang rendah dari pajak badan atau perusahaan. Terutama perusahaan sektor pertambangan yang penerimaan pajaknya lebih sedikit dibanding sektor lainnya yaitu pada tahun 2019 tumbuh minus 19% dan hanya terealisasi 66,12 triliyun, dibandingkan tahun 2018 yang bisa tumbuh positif hingga 50,7 %. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat sektor pertambangan rawan untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan agresivitas pajak dikarenakan pembayaran pajak tambang dikawasan hutan kekurangan 15,9 triliyun pertahunnya. Bahkan 2017 tunggakan PNPB disektor mineral dan batubara hingga 25,5 triliyun (*sumber*: Trusted Indonesian Tax News Portal DDTC News).[14]

Pada tahun 2018 Global Witness memberikan tuduhan dengan membuat laporan mengenai tindakan pajak yang agresif yang dilakukan oleh PT. Adaro energy Tbk yang merupakan perusahaan besar dalam sektor pertambangan. PT. Adaro energy Tbk dituding telah mengada-ngada dalam membuat laporan pajaknya, dikarenakan perusahaan tersebut hanya membayar pajaknya 1,75 triliun dimana nominalnya lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan. Global Witness juga mengungkapkan bahwa selama tahun 2009-2017 PT. Adaro Energy Tbk telah meminimalkan tagihan pajaknya hampir $14 juta pertahun.[15]

Fenomena dalam penelitian ini yaitu tentang perpajakan terutama yang terkait dengan tindakan agresivitas pajak. Fenomena agresivitas pajak terjadi pada perusahaan sektor pertambangan pada tahun 2009, dimana perusahaan pertambangan dalam kepemilikan Grup Bakrie telah melakukan tindakan pajak

---

[14] Darussalam, "Realistiskah Target Pajak 2020?," DDTCNews, 2020, https://news.ddtc.co.id/realistiskah-target-pajak-2020-18856?page_y=0.

[15] Vindry Florentin, "Adaro Tersudut Dugaan Penghindaran Pajak," Koran Tempo, 2017, https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/443777/adaro-tersudut-dugaan-penghindaran-pajak?

yang agresif sebesar Rp 2,176 triliun, perusahaan- perusahaan tersebut diantaranya PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dengan tunggakan pajak sebesar Rp 1,5 triliun, PT. Bumi Resources, Tbk sebesar Rp 376 miliar, dan PT. Arutmin Indonesia sebesar Rp 300 miliar. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh PT. KPC yaitu dengan cara mengalihkan penjualannya ke PT. Indocoal Resource Limited, anak usaha BUMI, di Kepulauan Cayman. Fenomena agresivitas pajak juga dinyatakan pada tanggal 5 Juli 2013, dimana pada saat itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang menyatakan bahwa 60 % perusahaan sektor pertambangan di Indonesia tidak melakuakan pembayaran pajak dan royalti kepada negara, sehingga merugikan negara sekitar Rp 100 triliun hingga Rp 120 triliun rupiah.[16]

Fenomena selanjutnya terjadi pada tahun 2016, dimana menurut Koordinator Sumber Daya Alam (SDA) menyatakan bahwa data perpajakan pada tahun 2016 menunjukkan jika perusahaan dalam sektor pertambangan rata-rata terindikasi telah melakukan tindakan agresivitas pajak. Data sebanyak 11.000 izin tambang, terdapat 4000 perusahaan mengalami permasalahan salah satunya dengan tidak patuh dalam membayar pajak.[17]

Penelitian menggunakan objek dari perusahaan sektor pertambangan yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Dengan dipilihnya objek tersebut supaya dapat mengetahui apakah perusahaan yang terdaftar dalam ISSI melakukan tindakan agresivitas pajak yang dinilai tidak sesuai dengan posisinya yang berada dalam lingkup syariah. Dan diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi dengan bukti baru tentang adanya tindakan agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan pertambangan yang sudah bergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Selain itu, alasan pemilihan objek pada perusahaan ISSI karena Indonesia merupakan negara

[16]Rindy Rosandya, “Sekitar 60% Perusahaan Tambang Tak Bayar Pajak,” Neraca, 2015, https://www.neraca.co.id/articel/30371.

[17] Abba Gabrillin, “KPK Sebut Dari 11.000 Izin Tambang, Hampir 4000 Izin Bermasalah,” Kompas, 2018, www.Kompas.com.

muslim terbesar sehingga memungkinkan penyebaran saham syariahnya paling banyak, dan juga ISSI masih tergolong baru karena diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011.[18]

Perusahaan ISSI merupakan perusahaan yang dapat dinilai sebagai perusahaan yang sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti dalam melakukan transaksi yang terhindar dari unsur gharar, riba dan tidak mengada-ngada dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan tindakan agresivitas pajak merupakan salah satu tindakan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip syariah, karena melakukan agresivitas pajak sama halnya dengan perilaku berbohong dan mengada-ngada dalam mengkalkulasi perhitungan pajaknya. [19]

Dari uraian penjelasan yang dijabarkan dalam latar belakang di atas serta beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh sebelumnya, maka peniliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengambil judul **"Pengaruh Kebijakan Hutang, Profitabilitas dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2014-2019)"**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan hutang berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2014 – 2019?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2014 – 2019?

[18] Edison sutan Kayo, "Saham Syariah (ISSI) Di BEI," Saham Syariah, 2017, https://www.sahamok.com/saham-syariah/.
[19] *Ibid*.

3. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Indonesia Periode 2014 – 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka diperoleh suatu tujuan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan hutang terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2014 – 2019.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2016 – 2019.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2014 – 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumbangan kepustakaan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan profitabilitas, *Corporate Social Resposibility* (CSR), serta tindakan agresivitas pajak. Dan diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang dapat berguna bagi pembaca .

b) Manfaat Praktisi

Bagi perusahaan, semoga penelitian ini menjadi gambaran tentang agresivitas pajak dan supaya terhindar tindakan agresivitas pajak dan terhindar dari sanksi pajak. Bagi investor, dapat menjadi gambaran tentang bagaimana cara perusahaan dalam memanajemen perusahaan dalam memperoleh keputusan dalam bidang perpajakan. Sedangkan bagi Direktorat

Jendral Pajak, diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi gambaran tentang perkembangan dan perubahan pajak di masa yang akan mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu kerangka yang menggambarkan alur pemikiran rencana penulisan dari awal hingga akhir penulisan pada penelitian, yang isinya mencakup elemen-elemen penting yang akan diteliti. Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dasar tentang alasan mengenai mengapa penelitian ini dilakukan. Pada bab pendahuluan berisi tentang latar belakang dari permasalahan, rumusan masalah, tujuan permasalahan, manfaat penelitian serta sistematika dari penulisan tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab telaah pustaka berisi tentang landasan teori mengenai penjelasan dari setiap variabel dependen (agresivitas pajak) dan variabel independen (kebijakan hutang, profitabilitas dan CSR). Selain itu juga berisi mengenai kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini membahas tentang metodologi penelitian, diantaranya berisikan tentang jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, serta yang terakhir tehnik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil yang diperoleh dari penganalisisan dan interpretasi dari hasil penelitian serta data yang didapatkan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan selama penelitian, saran bagi peneliti berikutnya dan penutup.

..

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Agensi*

Teori agensi merupakan suatu teori yang menjelaskan adanya keterkaitan antara pihak pemilik usaha (*principal*) dengan pihak manajemen (*agent*). Teori agensi terjadi karena adanya perjanjian atau kesepakatan antara keduanya dalam menjalankan perusahaannya untuk mencapai tujuan utama dari perusahaan yaitu dalam memperoleh laba semaksimal mungkin reputasi perusahaan dapat bertahan dan meningkat. Didalam teori agensi dapat menimbulkan asimetri informasi sehingga akan memunculkan konflik kepentingan. Asimetri informasi terjadi antara *agent* dan *principal* yang disebabkan karena adanya pemisahan antara keduanya. Pihak *agent* lebih banyak mengetahui tentang informasi pada perusahaan dibandingkan dengan principal. Munculnya konflik kepentingan antara agen dan principal dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara keduanya.[20]

Ada dua faktor yang dapat menimbulkan terjadinya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*, [21]yaitu:

1. *Adverse Selection*

   Adverse selection mengungkapkan adanya perbedaan informasi yang dimiliki pihak *principle* dan pihak *agent*. Terjadinya perbedaan informasi dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang memiliki informasi lebih sedikit. Misalnya pihak *agent* memanipulasi atau menyembunyikan informasi tentang keadaan perusahaan kepada

[20] Inayaturrohmah and Puspitosari, “Pengaruh Maqashid Syariah Index, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak", h. 101.

[21] Desi Natalya, “Pengaruh Capital Intensity, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Agresivitas Dengan Kinerja Pasar Sebagai Variabel Moderating,” *Media Akuntansi Perpajakan* 3, no. 1 (2018): 37–55, h. 32.

principle. Hal tersebut mengakibatkan ketidakyakinan *principle* terhadap keadaan perusahaan yang sebenarnya, jika dibandingkan dengan informasi yang diberikan *agent* tentang bagaimana keadaan dari perusahaan itu sendiri. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak *principle*.

2. *Moral Hazard*

   Moral Hazard merupakan suatu tindakan yang mengungkapkan adanya perbuatan menyimpang, perbuatan tersebut terjadi karena ketidakselarasan antara tindakan yang dilakukan oleh agent dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya oleh principle dan agent. Adanya ketidakselarannya biasanya disebabkan karena pihak agent memanipulasi data yang sebenarnya ataupun tindakan yang dilakukan agent menyimpang dari norma-norma yang sudah berlaku sebelumnya, sehingga tidak sesuai dengan harapan dari pihak principle itu sendiri. Biasanya agent melakukan tindakan Moral Hazard karena menginginkan keuntungan yang hanya untuk pribadi atau dirinya sendiri.

Teori Agensi juga terjadi karena adanya pemisahan diantara pemilik usaha (principle) dengan pihak manajemennya (agent). Dengan pemisahan tersebut pihak principle berharap agar dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan bisnisnya, dan ternyata dapat menimbulkan resiko yaitu adanya konflik antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang disebut *Agency problem* (masalah *agensi*).[22]

Agency problem juga dapat terjadi antara pemungut pajak (*fiskus/principle*) dengan pihak yang membayar pajak (manajemen perusahaan/*agent*). Dalam pemungutan pajak, pihak fiskus mengharapkan ada pemasukan yang sebanyak-banyaknya. Sedangkan pihak manajemen perusahaan, berpendapat bahwa seharusnya perusahaan dapat memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan mengharapkan biaya pajak yang ditangguhkan relatif rendah. Dengan adanya kedua pendapat yang

[22]*Ibid*., h. 31..

bertentangan, maka hal ini lah yang dapat menyebabkan terjadinya konflik antara pihak fiskus yang menjadi pemungut pajak dan manajemen perusahaan sebagai pihak yan memiliki kewajiban membayar pajak.[23]

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment system* yaitu pihak perusahaan yang diberi kekuasaan oleh pemungut pajak untuk dapat menghitung jumlah pajak yang ditangguhkan serta melaporkan pajaknya dengan sendiri. Dalam *self assessment system*, perusahaan yang dikendalikan oleh manajemen bertindak sebagai *agent* melaksanakan kewajiban membayar pajak, sedangkan *principal* sebagai pihak yang memungut pajak (fiskus)

Dengan adanya *self assessment system* , maka pihak agent memperoleh kesempatan yang untuk dapat melakukan tindakan manipulasi terhadap beban pajak yang ditangguhkan kepada perusahaan supaya menjadi lebihn rendah, dan biaya pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan menjadi semakin kecil. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara *legal* atau *illegal* yang disebut dengan tindakan agresivitas pajak.[24]

2.1.2 Kebijakan Hutang

Hutang disebut juga kewajiban, dalam istilah luas hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban bagi perusahaan yang meminjam dana, dan diharuskan untuk dibayar kepada pihak yang memberikan pinjaman. Selain itu hutang juga dapat didefinisikan sebagai sumber dana dari perusahaan yang diperoleh dari pihak lain atau kreditur. Hutang merupakan modal yang didapatkan dari luar perusahaan yang merupakan pengorbanan manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang disebabkan dari kewajiban-kewajiban di masa sekarang, dan diharapkan menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi dimasa

[23]Qurrota A'yun, *Pengaruh Corporate Social Responsibilitu, Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak* (Magelang: UMM, 2019), h. 18.

[24] Natalya, "Pengaruh Capital Intensity, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Agresivitas Dengan Kinerja Pasar Sebagai Variabel Moderating", h. 39.

sekarang, dan hutang dibayar cara mentransfer aktiva yang dimiliki perusahaan atau memberi jasa kepada pihak yang memberikan hutang.[25]

Hutang berdasarkan waktunya dibedakan menjadi tiga jenis,[26] yaitu:

1. Hutang Jangka Pendek *(Short-term debt*), adalah pelunasan hutang dengan jangka waktu kurang dari satu tahun. Utang jangka pendek juga dapat disebut sebagai hutang lancar, dan pelunasannya pun dapat melalui aktiva atau aset lancar perusahaan. Hutang jangka pendek meliputi:
   a Hutang wesel, merupakan surat perjanjian tertulis yang diperuntukan dalam pembayaran uang pada tanggal yang sudah ditetapkan pada masa mendatang, dan biasanya bersumber dari membeli sesuatu, pembayaran, dan kegiatan lainnya.
   b Kewajiban untuk membayar biaya (accrued expense) adalah hutang terjadi disebabkan oleh perusahaan yang belum menunaikan pembayaran, tetapi sudah memakai manfaat dari barang atau jasa tersebut.
   c Hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo merupakan separuh maupun keseluruhan hutang jangka panjang yang berubah menjadi hutang jangka pendek dikarena pembayaran segera dilakukan.
   d Hutang dari penjual adalah hutang yang terjadi karena adanya penjualan barang yang dilakukan secara kredit, dan penjual baru menerima dana dari hasil penjualannya selang beberapa hari sesudah barang diberikan.
   e Hutang dari pembeli adalah hutang yang diserahkan kepada perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok. Pembeli membayar

[25] Nurillah Sofi, *Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang Dengan Kebijakan Deviden Sebagai Variabel Moderasi* (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2018), h. 25.
[26] *Ibid*., h. 26.

barangnya terlebih dahulu, tetapi barang diterima pembeli setelah beberapa waktu setelah dibayar.

2. Hutang Jangka Menengah (*Intermediet-term debt*), merupakan pelunasan hutang dengan jangka waktu sekitar satu sampai sepuluh tahun. Menggunakan hutang ini dikarenakan apabila menggunakan hutang jangka pendek dan jangka panjang maka kebutuhannya sulit terpenuhi. Bentuk dari hutang jangka panjang meliputi:
   a *Term Loan* merupakan hutang yang usianya lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun. *Term Loan* diberikan dari bank dagang. perusahaan asuransi dan suppliers yang pembayarannya dengan angsuran tetap.
   b *Lease Financing* merupakan langkah untuk memperoleh *service* dari aktiva tetap, sama halnya dalam penjualan obligasi yang memperoleh *service* dan hak milik dari aktiva. Yang membedakan dengan *leasing* yaitu *leasing* tidak menyertai hak milik.
3. Hutang Jangka Panjang (*Long-term debt*), adalah hutang dengan jangka waktu pelunasannya lebih dari 10 tahun dan biasanya pembayarnnya dibayar secara bertahap. Kebutuhan belanja dengan jangka panjang biasanya dalam jumlah yang cukup besar, seperti pembelanjaan yang digunakan untuk perluasan atau mengembangkan perusahaannya (ekspansi). Yang termasuk dalam hutang jangka panjang yaitu:
   a Hutang hipotek (*mortgage payable*) merupakan hutang dengan memberikan hak hipotek kepada pemberi hutang berupa barang tidak dapat bergerak, dengan tujuan apabila pihak peminjam tidak bisa membayar hutang tersebut, maka barang dapat dijual serta hasilnya dipakai untuk memenuhi hutang tersebut.
   b Hutang obligasi (*bond payable*) adalah hutang jangka panjang yang dilaporkan dalam neracar perusahaan. Tujuan utamanya yaitu untuk meminjam uang dalam jangka waktu yang panjang, jika perusahaan memerlukan sumber dana yang jumlahnya besar

dan kreditur bersedia untuk memberikan pinjaman. Obligasi juga dapat diartikan sebagai surat yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan kepada investor yang akan membeli, yang di dalamnya terdapat pengakuan hutang perusahaan. atau dapat dijelaskan sebagai perjanjian tertulis untuk pembayaran hutang pada tanggal yang ditentukan dengan bunga periodik pada tingkat tertentu.

c Hutang bank jangka panjang, yaitu hutang dengan jumlahnya besar yang diberikan oleh bank kepada pihak peminjam dengan waktu pelunasannya yang panjang.

Dalam memperoleh laba maka memerlukan modal, baik modal yang diperoleh dari keuangannya sendiri ataupun dari hutang yang dipakai untuk kegiatan operasional usahanya. Dalam hukum islam juga mengatur tentang cara mendapatkan dan menggunakan modal, salah satunya apabila dalam penggunaan modal/hutang maka harus sesuai dengan prinsip syariah dan digunakan dengan tujuan yang benar yaitu untuk meningkatkan *kemaslahatan*. [27]Dari hadist riwayat Ibnu Majah dari Shuaib, Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثَ فِيْهِنَّ الْبَرْ كَةُ : اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَا رَضَةُ وَ خَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ما جه)

Artinya: "*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yakni jual beli dengan pembayaran tempo, muqaradah, dan mencampur gandum untuk keperluan rumah (tangga), bukan dalam rangka jual-beli*.

Maksud dari hadist di atas dijelaskan bahwa ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli yang dilangsungkan secara kredit untuk membantu orang yang sangat membutuhkan dana, *muqaradah (qiradh)* atau pinjaman yang diberikan sebagai modal usaha atau bisnis dengan nasabah diberikan jangka waktu untuk pelunasan kewajiban yang

[27] Sofi, *Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang Dengan Kebijakan Deviden Sebagai Variabel Moderasi, h. 42*.

telah disepakati, dan gandum yang dipanen bukan untuk dijual tetapi untuk kebutuhan makan sehari-hari.

Di dalam hadist tersebut dijelaskan mengenai tiga hal yang di dalamnya ada keberkahan, salah satu diantaranya yaitu muqaradah (qardh) atau hutang. Hutang yang didapat dengan tujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada perusahaan akan mejadi keberkahan bagi perusahaan. Hutang tersebut digunakan sebagai modal atau pengembangan usahanya untuk mensejahterakan pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaannya baik pihak internal maupun eksternal. Jadi penggunaan hutang untuk tujuan yang baik dan tidak merugikan antara dua belah pihak maka Allah akan memberikan keberkahan.

Sedangkan kebijakan hutang adalah suatu kebijakan dari pihak perusahaan (manajemen) dengan mengambil keputusan dalam mendapatkan sumber pendanaan dari pinjaman pihak luar yang digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan operasional perusahaan, atau bisa diartikan sebagai kebijakan perusahaan tentang seberapa jauh perusahaan menggunakan pendanaan hutang. Pendanaann hutang yang relatif tinggi nominalnya dapat memotivasi manajemen untuk bekerja lebih aktif dan kreatif karena terbebani dengan kewajiban yang harus dibayar.[28] Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang,[29] diantaranya:

1. Fleksibilitas finansial adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan modal dengan syarat-syarat yang tidak membebani walaupun perusahaan sedang dalam kondisi buruk.
2. Tarif pajak, yaitu semakin tinggi tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan maka semakin terdorong untuk menggunakan hutang.

---

[28] *Ibid.,* h. 27.

[29] Endang Sapitri, *Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang* (Lampung: Universitas Raden Intan, 2018), h. 45.

3. Sikap manajemen, yaitu semakin tinggi sikap agresif seorang manajer, maka manajer semakin terdorong untuk menggunakan hutang dengan tujuan untuk memperoleh laba yang besar.
4. Stabilitas penjualan yaitu perusahaan memiliki penjualan yang stabil sehingga dapat dengan aman untuk menggunakan hutang dan mengeluarkan biaya tetap lebih tinggi, dibanding dengan penjualan yang tidak stabil.
5. Struktur aset yaitu perusahaan memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan berhutang, maka akan lebih cenderung menggunakan hutang untuk usahanya.
6. Ukuran perusahaan, yaitu perusahaan dengan ukuran yang berskala besar akan lebih mudah untuk mendapatkan hutang, dikarenakan pihak kreditur lebih besar tingkat kepercayaannya daripada perusahaan yang berskala kecil.
7. Kondisi internal perusahaan, yaitu apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang sedikit, maka sedikit pula keterikatan investor untuk berinvestasi. Sehingga perusahaan memilih menggunakan sumber dana dari hutang.

Kebijakan hutang dapat menggambarkan langkah perusahaan dalam memperoleh sumber-sumber pendanaannya dari pinjaman. Perusahaan melakukan kebijakan hutang karena adanya keinginan atau suatu hal yang mendesak sehingga mengharuskan perusahaan menambah dana perusahaan yang dipakai untuk pemenuhan kebutuhan perusahaan. Di samping itu, perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk membayar hutang yang diberikan oleh kreditur, dengan adanya kewajiban tersebut maka perusahaan akan melakukan segala cara untuk memenuhi kewajibannya salah satunya dengan meningkatkan laba di perusahaan. Hal tersebut juga dijelaskan dari hadist riwayat Bukhari, II/841 bab man akhodza amwala an-naasi yuridu ada’aha nomor 2257:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – عَنِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّا سِ يُرِيْدُ أَداءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ, وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلاَ فَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ.

Dari Abu Hurairah, ia bekata bahwa Nabi bersabda:" *Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan tujuan untuk membayarnya, maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa mengambilnya untuk menghabiskannya, maka Allah akan membinasakannya*"

Maksud dari ayat di atas yaitu barang siapa yang berhutang dengan niat untuk mengembalikan atau membayar tepat waktu, maka Allah dapat memudahkan baginya untuk melunasi. Sebaliknya jika orang berhutang dengan disertai niat untuk tidak melunasinya maka Allah akan membinasakan hidupnya dengan hutang. Dengan maksud Allah akan mempersulit orang tersebut dalam melunasinya. Dan Allah melelahkan jiwanya karena memikirkan hutang. Jadi jika perusahaan ingin mengambil keputusan untuk berhutang maka alangkah baiknya memikirkan terlebih dahulu apakah bisa melunasi kewajibannya dengan tepat waktu atau tidak

Dengan adanya kebijakan hutang maka dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk menghadapi segala hal yang kemungkinan akan terjadi. Berikut tujuan dan manfaat,[30]diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dengan memberikan informasi kepada pihak lainnya tentang kondisi perusahaan karena pemakaian kewajiban.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa kesanggupan dari perusahaan dalam membayar kewajiban yang bersifat tetap (angsuran hutang dengan bunganya)
3. Untuk menilai dan menganalisis kesetaraan antara modal dan aktiva – aktiva (aktiva khusus dan tetap)

[30] Hendrik Maulana, *Pengaruh ROA, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*, Skripsi S1 (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019), h. 28.

4. Untuk mengukur dan menganalisis besarnya hutang yang dipakai untuk membiayai aktiva dari perusahaan,
5. Untuk menilai dan menganalisi pengaruh hutang perusahaan kepada pengelolaan aktiva perusahaan,
6. Untuk mengukur dan menganalisis seberapa besar modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan hutang jangka panjang,
7. Untuk dapat memperkirakan dan menganalisis jumlah dana pinjaman yang akan segera ditagih olehh kreditur.

Dalam mengukur kebijakan hutang penelitian ini menggunakan *debt to equity ratio* (DER) yang menggambarkan rasio antara total hutang dan total ekuitas. DER adalah rasio dalam pengelolaan modal dengan menggambarkan seberapa banyak modal yang dibiayai oleh pinjaman. Rasio ini juga digunakan untuk melihat seberapa banyak jumlah dana yang disediakan oleh kreditur kepada debitur. Salah satu fungsi dari rasio ini yaitu dapat mengetahui seberapa banyak hutang yang dijamin dengan modal sendiri. Apabila rasio besar maka dapat diambil keputusan jika struktur modal perusahaan sebagian besar didanai dengan hutang.[31]

2.1.3 Profitabilitas

Profit atau laba merupakan hasil pendapatan yang diperoleh dari penjualan dikurangi dengan beban. Laba adalah sebagai berikut:

"*Profit is information that becomes a parameter to measure the increase or decrease in company performance*"[32]

Profit juga merupakan elemen terpenting dalam menjalankan usaha yang menjadi tambahan pendapatannya, dan dapat dijadikan jaminan untuk kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan mendatang. Berbagai hal

[31]*Ibid*., h. 20.

[32]Novia Megarani, Warno Warno, and Muchammad Fauzi, "The Effect of Tax Planning, Company Value, and Leverage on Income Smoothing Practices in Companies Listed on Jakarta Islamic Index," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1, no. 1 (2019), h. 140.

dilakukan guna meningkatkan profit atau laba salah satunya dengan melakukan efisien biaya dan meningkatkan produktivitas serta efektivitas, sehingga perusahaan memiliki kompetetif yang unggul. Keberhasilan perusahaan dapat diukur dengan kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan dalam bersaing di pasar, serta kemampuan perusahaan dalam melakukan ekspansi usahanya. Adanya kemampuan menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya perusahaan, maka tujuan – tujuan perusahaan dapat dicapai.[33]

Dalam ayat Al-Qur'an juga menjelaskan tentang profitabilitas tercantum dalam surah Asy-Syura ayat 20, yang artinya:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاَ خِرَةِنَزِدْلَهُ فِيْ حَرْثِهِ ۚ وَمَنء كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَاالل ۙ
وَمَالَهُ فِى الْاَ خِرَةِمِنْ نَّصِيْبٍ (20).

"Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagianpun di akhirat"[34]

Maksut dari QS. Asy-syura ayat 20 yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam usahanya untuk memperoleh keuntungan (laba) maka akan dilipatgandakan keuntungannya, dan tidaklah sia-sia dalam usahanya. Tetapi jika bermalas-malas dalam usahanya maka akan menjadi rugi/bangkrut.

Selanjutnya, dari hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عن عروة البا رقى أنّ النّبىّ صلّى الله عليه وسلّم أعطاه دينا را يشترى له شاة فاشترى له ه
شاتين فباع إحدا هما بدينا روجاءه بد ينار وشاة فدعاله بالبر كة فى بيعه وكان لو اشترى التّرابَ
لربح فيه 15

[33] Prasista and Setiawan, "Pengaruh Profitabilitas Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan", h. 2129.

[34] Putra, *Al-Quran Dan Terjemahannya (Transliterasi Arab-Latin) Model Kanan Kiri, h. 1081*.

Artinya: *Dari 'Urwah al-Bariqi. "Bahwasannya Nabi saw. memberinya uang satu dinar untuk dibelikan kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi saw. dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendoakan semoga jual belinya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat keuntungan pula*.[35]

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa Rasulullah pun menganjurkan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Hal tersebut bermula ketika Rasul meminta kepada Urwah al-Bariqi untuk dibelikan kambing dengan memberi uang satu dinar. Kemudian dengan uang satu dinar Urwah dapat membeli dua kambing, dan setelah itu ia tetap memberikan satu kambing kepada Rasul sesuai permintaannya. Rasul mengetahuinya dan mendoakan supaya Urwah mendapat berkah dengan jual beli yang mereka lakukan, dan seandainya uang itu digunakan untuk membeli tanah maka akan mendapatkan keuntungan juga.

Dari ayat Al-Quran dan Hadist di atas, maka dapat disimpulkan bahwa islam menganjurkan kepada umat manusia untuk mengembangkan harta atau modalnya yang digunakan untuk usaha, dengan cara mengelola dan mengendalikan dengan baik hartanya. Tujuan utama didirikannya usaha yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Islam memperbolehkan seseorang menjadi pembisnis dan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena memang semua kegiatan yang berkaitan dengan bisnis masuk dalam aspek muammalah yang mempunyai dasar kaidah untuk dibolehkannya melakukan sesuatu selama itu tidak menyimpang dari aturan-aturan syariah. Berapapun banyaknya laba atau profit yang diperoleh, selama tidak terdapat unsur-unsur keharaman dan kedzaliman maka dibolehkan dalam islam.

---

[35]Sari, "Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi", h. 27".

Profitabilitas adalah suatu kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh keuntungan, yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber yang ada dalam perusahaan (yaitu modal yang tersedia, aktiva maupun penjualan). Atau profitabilitas dapat diartikan sebagai indikator kinerja yang menjelaskan pengelolaan kekayaan yang biasanya dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan laba dari hasil penjualan atau perolehan investasi. Berikut tujuan profitabilitas untuk pihak dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan [36]yaitu:

1) Untuk mengukur dan mengetahui perolehan laba perusahaan selama satu periode tertentu,
2) Untuk menilai dan mengetahui perolehan laba perusahaan ditahun sebelumnya dan juga berikutnya,
3) Untuk menilai dan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan laba perusahaan dari masa ke masa,
4) Untuk menilai dan mengetahui laba bersih sesudah pajak yang diperoleh dengan modal sendiri,
5) Untuk mengukur dan mengetahui seberapa produktivnya dana perusahaan dikelola, baik yang berasal dari modal sendiri ataupun modal pinjaman.

Penilaian profitabilitas merupakan cara menentukan baik dan tidaknya aktivitas-aktivitas yang diterapkan untuk mencapai tujuan ditargetkan, mengurangi pemborosan-pemborosan yang dikeluarkan perusahaan, dan dengan tepat menyajikan informasi untuk melaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan. Rasio profitabilitas dapat mengukur keefektifan kinerja manajemen yang digambarkan dari perolehan hasil yang didapatkan dengan aktivitas penjualan dan investasi.

[36] Maulana, *Pengaruh ROA, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance, h. 24*.

Berikut ukuran dalam rasio profitabilitas yang dibagi menjadi beberapa jenis, [37] diantaranya:

1. *Gross Profit Margin*, rasio yang menjelaskan seberapa besar perolehan laba kotor dari penjualan suatu barang atau jasa.
2. *Net Profit Margin*, yang menjelaskan banyaknya perolehan dari laba bersih perusahaan. Apabila profit margin lebih rendah atau sedikit dari rata-rata industri, maka dapat disimpulkan bahwa harga jual dari perusahaan tersebut lebih rendah dari perusahaan pesaing.
3. *Return On Common Equity* (ROE), rasio untuk menghitung tingkat pengembalian saham, dengan membagi laba bersih terhadap modal saham ekuitas umum. Apabila rasio ROE tinggi maka dapat disimpulkan bahwa pihak dari manajemen lebih efisien dalam menggunakan modal sendiri .
4. *Return on Asset (ROA)*, rasio kemampuan dasar menghasilkan laba, dengan mengukur tingkat pengambilan dari bisnis atas seluruh aset yang ada, atau rasio ini menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam operasional.

Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas dihitung menggunakan ROA karena ROA menunjukkan besarnya laba perusahaan dari total aset yang dimilikinya, aset yang dihitung didapatkan dengan modal sendiri atau modal asing yang sudah dikonservasi ke bentuk asset perusahaan dan dipakai sebagai kegiatan pengelolaan usahanya.

Selain itu, dengan ROA juga dapat mengukur perolehan laba perusahaan masa sekarang dan di proyeksikan ke masa yang akan datang. [38] ROA juga memiliki kelebihan yaitu komprehensif dalam pengukurannya dan keseluruhannya mempengaruhi laporan keuangan serta rasio ROA dapat dengan mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolut.

---

[37] Hengky Robet M Tarigan, “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak,” no. 2004 (2016): 12–20, h. 15.

[38] Inayaturrohmah and Puspitosari, “Pengaruh Maqashid Syariah Index, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak", h. 102.

ROA yang positif menunjukkan bahwa total aktiva yang digunakan sebagai operasional perusahaan dapat menghasilkan laba perusahaan, sebaliknya jika ROA negatif menunjukkan total aktiva yang digunakan mengalami kerugian. Rasio ROA yang tinggi maka menunjukkan kinerja dari perusahaan yang semakin membaik terutama dalam hal penggunaan aset untuk mendapatkan keuntungan bersih dan berpeluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan.[39]

Perusahaan yang dengan tingkat rasio profitabilitas yang tinggi menggambarkan kesuksesan dari kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya, sehingga menjadikan daya tarik tersendiri bagi investor untuk melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut. Dan begitu juga jika tingkat profitabilitasnya rendah, maka investor cenderung tidak akan tertarik untuk penanaman modal atau bahkan investor dapat menarik kembali modal yang sudah ditanam dalam perusahaan. Kondisi ini sangatlah penting bagi perusahaan, karena dapat mempertahankan pertumbuhan bisnisnya dan kelangsungan hidup perusahaannya. [40]

2.1.4 *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu tindakan kepedulian sosial yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud rasa pertanggung jawaban terhadap masyarakat dan juga pemerintah dengan keberadaan usahanya yang dikhawatirkan dapat mengganggu lingkungan sekitar dan kegiatan-kegiatan sosial dimasyarakat. CSR juga dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh entitas bisnis terhadap pihak yang terikat dalam ranah ekonomi,sosial dan lingkungan dengan tujuan untuk meminimalisir pengaruh negatif dan memaksimalkan pengaruh positif

[39] Razif and Rizq Al Aqibullah, "Pengaruh Thin Capitalizion, Capital Intensity, Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak," *El. Muhasaba* 8, no. 1 (2017), h. 50.

[40] Azzahra Dita Reminda, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas , Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak," *JOM Fekon* Vol. 4, no. 2 (2017), h. 4283.

operasional perusahaan dengan tujuan agar perencanaan pembangunan dapat tercapai. [41]

Kebijakan, strategi dan operasi yang dikembangkan oleh perusahaan tidak hanya berpusat pada pemegang saham (*stakeholder*), tetapi juga terdistribusi pada pemangku kepentingan (pemerintah, komunitas perdagangan, karyawan, pemasok, dan pelanggan) serta masyarakat umum. Selain itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga dapat didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas atau masyarakat sekitar melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Ada beberapa faktor yang mendorong perusahaan untuk mengungkapkan CSR, adapun faktor-faktornya,[42]yaitu:

1. Perusahaan berkeinginan dan yakin dapat mematuhi peraturan yang ada dalam undang-undang,
2. Mempertimbangkan rasionalitas ekonomi,
3. Bersedia untuk bertanggungjawab atas kegiatan usahanya, dan melaporkan dalam laporan tahunan,
4. Sanggup untuk menyediakan informasi secara jujur tentang keadaan perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah
5. Untuk mengukur manakah kelompok *stakeholer* yang berpengaruh kuat terhadap usahanya,
6. Untuk mematuhi peraturan yang terdapat dalam sektor tersebut,
7. Supaya mendapatkan penghargaan dengan adanya pelaporan tersebut.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2017 mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Undang-undang Nomor 25 tentang penanaman modal, dimana kedua peraturan tersebut berkaitan dengan program CSR dan peraturannya juga disahkan bersamaan dengan kemunculan CSR di

[41] Hengky Robet M Tarigan, “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak", h.4.

[42]Dwi Fionasari, Enni Savitri, and Andreas Andreas, “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak,” *Sorot* 12, no. 2 (2017), h. 98.

Indonesia. Penjelasan pada pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang bunyinnya[43]:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau yang berhubungan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan serta kewajaran,
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam pasal 25 (b) Undang-undang Penanaman Modal menyatakan kepada setiap penanam modal untuk wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dengan disahkannya kedua peraturan tersebut, maka dapar disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia telah berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya dengan menerapkan program CSR pada perusahaan ataupun penanam modal dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Penjelasan mengenai segala bentuk tanggung jawab pada perusahaan selama melakukan kegiatan usahanya yang diungkapkan atau diinformasikan secara transparansi kepada pihak yang berhubungan dengan perusahaan atau masyarakat luas disebut dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perusahaan yang dapat mencapai keberhasilan dan kesuksesan dalam mengelola usahanya, karena disebabkan dengan adanya

[43] *Ibid.,* h. 99.

penerapan suatu program salah satunya CSR. Maka dari itu, sebagian besar perusahaan memanfaatkan CSR untuk mendapatkan keuntungan. [44]

Menurut [45] terdapat 10 keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pengungkapan CSR, yaitu

1. Dapat menjaga dan meningkatkan reputasi serta nilai-nilai dari perusahaan,
2. *Social license to operate* didapatkan oleh perusahaan,
3. Resiko yang dapat terjadi di perusahaan dapat dikendalikan dan dikurangi,
4. Sumber daya perusahaan dapat terakses dengan cepat,
5. Akses ke arah market dapat dikembangkan,
6. Biaya yang digunakan untuk keperluan tidak penting dapat terkendalikan,
7. Dapat memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*,
8. Memperbaiki hubungan dengan *regulator* (pemerintah),
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan,
10. Perusahaan berpeluang untuk mendapatkan penghargaan.

Dalam memperoleh keuntungan perusahaan juga harus memperhatikan dan menerapkan prinsip yang terkandung dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) demi keberhasilan pelaksanaan program CSR, berikut prinsip-prinsip yang dibagi menjadi 3,[46] yaitu:

1. Sustainability, berkaitan tentang aktifitas (action) yang dilakukan perusahaan dengan mempertimbangkan kelangsungan dan keberadaan sumber daya pada masa yang akan datang.

---

[44] Muhammad Rizky Andrianto and Achmad FAdjar, “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak,” *SNAB* (2017), h. 863.

[45] Jessica and Toly, “Pengaruh Pengungkapan Program Corporate Social Responsibility", h. 4.

[46] Sari, “Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi". h. 30.

2. Accountability, yaitu suatu usaha yang diberikan oleh perusahaan untuk terbuka kepada publik, dan bertanggung jawab terhadap segala aktifitasnya,
3. Transparency, adalah salah satu prinsip terpenting terutama bagi eksternal perusahaaan. Dengan adanya prinsip transparency maka dapat mereduksi ketidakseimbangan yang terjadi pada perusahaan, salah satunya dengan informasi pertanggungjawaban dari perusahaan.

Pentingnya prinsip yang terkandung dalam kegiatan CSR juga dijelaskan dalam QS. Al-A'raf ayat 85:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَإِصْلَا حِهَا

85)

"Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya"[47]

Berikanlah hak-hak manusia sesuai apa yang telah menjadi haknya. Dan janganlah mengurangi takaran atau timbangan yang akan diberikannya. Dan janganlah merusak apa yang ada dimuka bumi termasuk lingkungan karena itu semua ciptaan Allah.

Jika ayat tersebut dikaitkan dengan praktik CSR maka perusahaan harus terbebas dari berbagai macam modus korupsi, dan memberikan pelayanan sepanjang masa operasionalnya. Dan jika niat dari perusahaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan mengharapkan ridha Allah maka akan mendapatkan pahala seperti melakukan ibadah. Adanya program CSR maka menjadikan perusahaan dekat kepada masyarakat dan pemerintah, selain itu juga semakin dekat dengan Allah. Selain itu, perusahaan menjadi lebih tanggung jawab dan tidak merusak lingkungan disekitarnya. Karena di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul dijelaskan bahwa

[47] Putra, *Al-Quran Dan Terjemahannya (Transliterasi Arab-Latin) Model Kanan Kiri, h. 338*.

seorang pembisnis atau pengusaha harus melakukan kebaikan dan mematuhi segala perintah Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi :

لَيْسَ الْبِرَّأَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَ خِرِ
وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالْكِتَٰبِ والنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَٰى حُبِّهِ , ذَوِى الْقُرْ بَٰى وَالْيَتَٰمَٰى وَالْمَسَٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآ
ئِلِينَ وَفِى الرِّقَا بِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَى الزَّكَوٰةَ وَالْمُو فُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُواْ وَالصَّٰبِرِينَ فِى الْبَأْ سَآ ءِ
وَالضَّرَّآ ءِوَحِيينَ الْبَأْ سِ أُوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian , malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta: dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat: dan orang-oranng yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) : dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa".(*QS. Al-Baqarah: 177)[48]

Islam juga merupakan agama yang memprioritaskan akan penting bersosial kepada masyarakat, bukan hanya menghadapkan wajahnya ke arah timur dan arah barat ketika sholat. Di dalam Al-Quran dianjurkan umat manusia untuk menjalankan rukun iman yaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, nabi-nabi, kitab-kitab, hari akhir, qadha dan qadar. Rukun iman dapat dikatakan sempurna apabila dalam menjalankannya menyertakan amalan-amalan sosial seperti peduli dan memberikan bantuan terutama kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin dan orang yang membutuhkan pertolongan saat perjalanan jauh serta menjamin kesejahteraan mereka yang sedang membutuhkan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam islam sudah dijelaskan mengenai perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan prinsip yang tercantum di dalam pengungkapan CSR, contohnya memberikan

[48] *Ibid*., h. 58.

pertolongan atau membantu orang yang sedang membutuhkan. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan CSR maka perusahaan dapat terdorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan pendistribusian kekayaan di masyarakat dapat seimbang sehingga produktivitas masyarakat dapat terjamin serta permasalahan sosial yang terdapat di masyarakat dapat terkendalikan. Distribusi kekayaan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam islam, dikarenakan islam menganjurkan agar harta kekayaan dapat beredar di semua kalangan masyarakat supaya tidak hanya beredar disegelintir orang saja.[49]

CSR dalam perusahaan merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba dalam perusahaan, akan tetapi tidak dapat mengurangi perhitungan fiskal, oleh karena itu banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dengan cara memasukkan beban CSR ke beban lain-lainnya yang diakui perpajakan. Sehingga diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa biaya yang digunakan untuk kegiatan CSR termasuk *tax deduction* (biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan laba kena pajak) dan diharapkan dapat memberikan motivasi perusahaan untuk melakukan CSR serta menghindari tindakan agresivitas pajak. Dikarenakan perusahaan yang melakukan strategi pajak yang agresif dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial.[50] Karena perusahaan tersebut kurang kesadaran untuk melakukan CSR, dan salah satu yang mempengaruhinya yaitu keinginan pihak manajemen untuk memperoleh laba yang besar, sehingga memandang jika melakukan pembayaran pajak dan menerapkan CSR hanya akan mengurangi penghasilan laba perusahaan.[51]

---

[49] Putra.

[50] Kholid Hidayat et al., "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi* 2, no. 2 (2016): 39–58, h. 41.

[51] Napitu and Kurniawan, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014 h. 3.

Pengungkapan CSR saling berkaitan dengan agresivitas pajak terutama dalam mencapai tujuan yang diprioritaskan oleh perusahaan yaitu memaksimalkan perolehan laba tanpa menghilangkan pertanggung jawaban sosial. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya tersebut dikurangkan dengan penghasilan bruto sehingga besarnya laba yang diperoleh akan semakin rendah dan pajak yang dibayar perusahaan juga lebih sedikit sehingga perusahaan akan lebih agresif untuk memperoleh laba yang besar.[52]

Apabila semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR maka tindakan agresivitas pajak diharapkan tidak dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan jika perusahaan melakukan agresivitas maka reputasi perusahaan menjadi buruk dimata *stakeholder*, masyarakat, dan juga pemerintah, serta menurunnya nilai-nilai perusahaan dan pengaruh positif dari CSR yang telah diungkapkan dapat menurun juga.

Pengungkapan perusahaan atas tanggung jawabnya terhadap sosial disebut dengan CSRDI *(Corporate Social Responsibility Disclosure Index)*, atau dapat diidentifikasikan sebagai cara perusahaan untuk dapat berkomunikasi kepada pihak *stakeholders* mengenai informasi-informasi sosial dan lingkungan. Standar pengungkapan CSR yang dikembangkan GRI (*Global Reporting Initiatives*) digunakan sebagai rujukan oleh Indonesia dalam mengembangkan standar CSRnya.

GRI merupakan panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang di gagas PBB lewat *Coalition for Environmental Economies* (CERES) dan (UNEP) tahun 1997. Perusahaan-perusahaan besar di dunia sebagian besar memilih menggunakan panduan GRI, karena GRI sendiri menyediakan rancangan laporan yang berkelanjutan secara kompehensif. GRI mempunyai tujuan yaitu agar dapat meningkatkan kualitas dengan memanfaatkan *sustainbility reporting*, sehingga standar

[52] *Ibid.*, h. 10.

yang diungkapkan GRI lebih difokuskan terhadap kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan sekitar perusahaan.[53]

GRI G4 merupakan indikator yang memakai aturan internasional dan telah diakui perusahaan dunia serta memiliki komitmen untuk mengembangkan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia. Terdapat tiga kategori yang diungkapkan dalam CSR diantaranya kinerja sosial, kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan. Jumlah keseluruhan item yang terdapat dalam GRI G4 yaitu sebanyak 91 item.[54]. GRI G4 membuat informasi yang bermanfaat supaya pasar dan masyarakat dapat percaya, dengan cara menyediakan rancangan kinerja yang relevan secara umum dan keseluruhan sehingga tingkat transparansi serta konsistensi dapat terdorong dalam menyediakan informasi.

GRI *Standard Disclosure* G4 memuat tiga komponen dengan indikator-indikatornya sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Ekonomi (*Economic Performance Indicator*)
2. Indikator kinerja Lingkungan (*Environmental Performance Indicator)*
3. Indikator kinerja Sosial (*Social Performance Indicator*), yang terdiri dari 4 aspek indikator, diantaranya:

1) Indikator Kinerja Praktek Kerja dan Kelayakan Kerja (*Labor Practices and Decent Work Performance Indicator)*
2) Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (*Human Rights Performance Indicator*)
3) Indikator Kinerja Masyarakat (*Society Performance Indicator*)
4) Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk (*Product Responsibility Performance Indicator)*

Penilaian yanng dilakukan dalam mengukur pengungkapan CSR yaitu dengan memberi skor 0 dan 1. Apabila item tidak diungkapkan maka

[53] Sapitri, *Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang, h. 34*.

[54]Rico Elia Anggajaya, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Return Saham" 2018, h. 46.

diberi skor 0, dan skor 1 diberikan jika item diungkapkan perusahaan. Dan apabila perusahaan mengungkapkan keselurahan item CSR maka nilai maksimal yang dicapai yaitu 91.[55]

2.1.5 Agresivitas Pajak

Pajak didefinisikan sebagai suatu iuran yang diwajibkan oleh rakyat yang diberikan kepada negara berdasarkan ketentuan dan peraturan yang telah diberlakukan, dan masyarakat secara langsung tidak mendapat timbal balik akan tetapi dengan iuran yang sudah diberikan digunakan oleh negara untuk kepentingan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas.

Definisi pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bisa dipaksakan, dan didasari atas Undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk membiayai keperluan negara yang sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Terdapat dua fungsi yang dimiliki oleh pajak diantaranya berfungsi sebagai anggaran (*budgetair)* yang artinya pajak digunakan untuk membiayai belanja rutin dari negara ataupun untuk pembangunan. Dan pajak berfungsi sebagai pengatur (*regulerend)* yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan melakukan segala kebijakan dari pemerintah terutama dibidang ekonomi dan sosial. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terpenting dan paling berperan dalam kontribusi pembangunan negara. Oleh karena itu, pajak memiliki presentase terbesar dari total keseluruhan penerimaan pajak.[56]

Pajak merupakan salah satu isu yang kini cukup fenomenal dikalangan masyarakat. Maka dari itu, banyak perusahaan yang melakukan

---

[55] Reminda, “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas , Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak", h. 4287.

[56] Dewa Ayu Nyoman Shintya Devi and Luh Gede Krisna Dewi, “Pengaruh Profitabilitas Pada Agresivitas Pajak Dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Moderasi,” *E-Jurnal Akuntansi* 27 (2019), h. 792.

berbagai cara untuk memimalkan pembayaran beban pajak salah satunya dengan melakukan tindakan agresivitas pajak, dimana tindakan tersebut tidak asing dikalangan masyarakat Perusahaan – perusahaan besar maupun kecil melakukan tindakan agresivitas pajak dengan tujuan untuk meminimalkan besarnya biaya pajak dari yang ditangguhkan oleh instansi pajak atau dapat disimpulkan sebagai usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya pajak. Perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. Agresivitas pajak juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan mengurangi tingkat pajak yang efektif. [57] Penjelasan lain mengenai perencanaan pajak sebagai berikut:

"Tax planning or tax planning is the initial stage for systematic analysis of various tax treatment alternatives with the aim of achieving minimum tax obligations."[58]

Dalam memulai usahanya, manajemen perusahaan melakukan *tax planning* (perencanaan pajak) dengan tujuan supaya laba yang diperoleh tidak terkurangkan lebih banyak karena adanya kewajiban nenbayar pajak, sehingga perusahaan memilih keputusan dengan cara melakukan tindakan pajak yang agresif.

Tindakan untuk melakukan agresivitas pajak dapat dibagi menjadi dua macam [59] yaitu

1. *Tax evasion* (penggelapan/penyelundupan pajak) merupakan suatu usaha yang dilakukan wajib pajak dengan melanggar ketentuan atau ketetapan pajak secara illegal dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Penggelapan/penyelundupan pajak yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena

[57] Sarjito Surya and Siti Noerlaela, "Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi* VII, no. 1 (2018): 101–18, h. 55.

[58] Megarani, Warno, and Fauzi, "The Effect of Tax Planning, Company Value, and Leverage on Income Smoothing Practices in Companies Listed on Jakarta Islamic Index", h. 147.

[59] Prasista and Setiawan, "Pengaruh Profitabilitas Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan", h. 2122.

tehnik dan metode yang digunakan bertentangan dengan koridor Undang-undang dan peraturan perpajakan.

2. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) yaitu suatu upaya yang dilakukan wajib pajak agar pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. *Tax Avoidance* bukanlah tindakan yang melanggar ketentuan pada Undang-undang Perpajakan, akan tetapi perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melanggar jiwa Undang-undang. *Tax avoidance* masih berada pada aturan perpajakan, yang pada umunya tindakan tersebut merujuk pada proses merekayasa pada pajak yang seharusnya dibayar, sehingga beban pajak jumlahnya menjadi lebih minimum.

Tax Avoidance atau penghindaran pajak juga merupakan praktik menunda-nunda pembayaran beban pajak. Di dalam islam melakukan penundaan dalam mengerjakan segala sesuatu merupakan tindakan yang buruk. Berikut QS. Al-Hadid ayat 14 yang terkait dengan kegiatan menunda-nunda:

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ (14)

Artinya: *Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata: "Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" Mereka menjawab: "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu (kehancuran kami) dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (syaitan) yang amat menipu.*(QS. Al-Hadid: 14)[60]

Maksud dari ayat diatas bahwa orang-orang munafik itu menyeru kepada kaum munafik dengan berkata "Bukankah dulu waktu di dunia kami ini adalah teman kalian?". Kemudian dijawablah oleh orang-orang mukmin "Apa yang dikatakan kalian itu memang benar, akan tetapi dengan sikap kemunafikanmulah yang membuat diri kalian menjadi hancur, kalian mengharapkan akan terjadi sesuatu yang dapat menimpa orang mukmin,

[60] Putra, *Al-Quran Dan Terjemahannya (Transliterasi Arab-Latin) Model Kanan Kiri, h. 1223*.

kalian ragu-ragu dalam masalah keagamaan dan tertipulah oleh harapan-harapan yang nihil. Kemudian kalian akan terlihat biasa-biasa saja, lalu datanglah kematian dengan setan yang akan menipu diri kalian dengan membuat jaminan jika Allah dapat mengampuni dosa-dosanya.

Tafsir diatas dapat diambil kesimpulan bahwa menunda-nunda amal yaitu perbuatan setan untuk menipu manusia. Dalam hal itu tindakan penghindaran pajak juga merupakan kegiatan yang menunda-nunda yaitu penundaan dalam membayar pajak yang artinya sama dengan melakukan penundaan untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang berguna bagi kebutuhan atau kepentingan rakyat.

Konsep ini memiliki kesamaan terhadap konsep zakat yaitu mempunyai kesamaan yang berguna untuk kepentingan rakyat, dan yang membedakan hanyalah kepada siapa kewajiban itu dilaksanakan.[61]

Selanjutnya ayat yang menerangkan tentang *Tax evasion* yang diartikan sebagai penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak dengan cara menyembunyikan keadaan perusahaan yang sebenarnya.[62] Dalam islam melakukan kebohongan merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah. Dalam QS. An-Nahl ayat 105, yang berbunyi :

إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْ مِنُونَ بِأَ يَّتِ اللهِ صلى وَأُوْلَّئِكَ هُمُ الْكَذِ بُونَ (105

Artinya: *"Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong atau pendusta"*[63]

Maksut dari ayat di atas orang yang berbohong dalam segala hal merupakan orang yang tidak beriman kepada Allah, padahal sudah jelas jika berbohong adalah salah satu hal yang sangat dibenci Allah dan merupakan

---

[61] Inayaturrohmah and Puspitosari, "*Pengaruh Maqashid Syariah Index, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak"*, h. 99."

[62] Hengky Robet M Tarigan, "*Pengaruh Corporate Social Respomsibility dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012 -2014)*", h. 5."

[63]Putra, *Al-Quran Dan Terjemahannya (Transliterasi Arab-Latin) Model Kanan Kiri, h. 571*.

perbuatan yang tercela. Dan berbohong juga termasuk pendusta, karena tidak takut dengan azab Allah dan tidak mengharap ridhanya.

Melakukan agresivitas pajak sama halnya dengan melakukan kebohongan, Allah tidak menyukai umatnya yang berbohong. Agresivitas pajak sama dengan perusahaan berbuat bohong dengan melakukan segala cara untuk kepentingan usahanya tanpa memikirkan sebab akibat dikemudian hari dan tidak merasa takut sama sekali. Suatu perusahaan dapat dianggap tidak memperdulikan keadaan sosial apabila melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak sebagian besar dilakukan atau merasuk ke dalam tata kelola perusahaan yang lemah.[64]

Perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak karena disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya[65]:

1. Nominal pembayaran pajak yang akan dibayarkan cukup besar, semakin banyak nominalnya maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan yang melanggar perpajakan.
2. Adanya biaya yang digunakan menyuap fiskus. Wajib pajak akan cenderung bertindak agresif terhadap pajak, apabila biaya untuk menyuap fiskus kecil.
3. Kesempatan terdeteksinya minim, apabila terdeteksinya pelanggaran pajak semaki kecil, maka wajib pajak berpeluang besar untuk dapat melakukan pelanggaran pajak.
4. Besarnya sanksi, semakin ringannya sanksi yang didapatkan ketika melanggar pajak maka semakin besar kecenderungan wajib melakukan pelanggaran.

---

[64] Bani Nugraha and Meiranto Wahyu, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Akuntansi* 4, no. 4 (2015): 1–15, h. 5.

[65] Muriani, *Pengaruh Leverage, Likuiditas, Capital Intensity Dan CSR Terhadap Agresivitas Pajak*, Skripsi (Sultan Syarif KAsim, 2019), h. 20.

Ada beberapa keuntungan dan juga kerugian yang akan didapat perusahaan apabila melakukan tindakan agresivitas pajak. Keuntungan yang didapat dari tindakan pajak agresif yaitu[66]:

1. Mendapatkan keuntungan berupa penghematan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara, sehingga pemilik atau pemegang saham perusahaan memperoleh jumlah kas yang lebih besar, dan dapat digunakan untuk mendanai investasi perusahaan sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang.
2. Manajer mendapatkan keuntungan berupa kompensasi yang diberikan oleh pemilik atau pemegang saham karena melakukan agresivitas pajak.
3. Manajer memiliki keuntungan untuk melakukan *rent extraction*, yakni tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik. Hal tersebut dapat berupa menyusun laporan keuangan yang agresif, menggunakan sumber daya atau aset perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun bertransaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Sedangkan kekurangan dari perusahaan akibat melakukan agresivitas pajak[67] yaitu:

1) Kemungkinan besar pihak instansi pajak akan memberikan hukuman kepada perusahaan karena pada saat dilakukannya proses audit ditemukan tindakan kecurangan yang menyeleweng dari ketentuan perpajakan.
2) Merosotnya reputasi perusaahaan di mata stakeholder dan masyarakat, dikarenkan adanya pernyataan yang dikeluarkan instansi perpajakan atas hasil auditnya, selain itu pihak stakeholder dapat berasumsi bahwa

[66] Sulistyowati and Ariska Lisa, "Pengaruh CSR, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak," *Balance* 15, no. 2 (2015), h. 243.
[67] *Ibid*., h. 244.

dengan tindakan agresivitas pajak maka dapat merigukannya karena adanya tindakan rent extraction yang dilakukan manajer.

Sanksi dan hukuman dapat diberikan oleh pihak instansi perpajakan kepada siapa saja yang melakukan tindakan agresivitas pajak, karena dianggap dapat merugikan berbagai pihak. Tercantum di dalam undang – undang perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), kedua jenis pelanggaran ini diatur dalam pasal yang berbeda-beda dan terdapat dua macam sanksi perpajakan diantaranya sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap ketententuan perpajakan dapat dikenakan ancaman yang hanya berupa sanksi administraasi atau sanksi pidana saja dan bahkan dapat dikenakan ancaman dengan kedua macam sanksi tersebut.[68]Di dalam undang-undang perpajakan terdapat penjelasan mengenai hal yang membedakan antara sanksi adiministrasi dan sanksi pidana antara lain:

1. Sanksi administrasi yaitu sanksi untuk membayar kerugian kepada negara. Sanksi tersebut diperoleh karena dilatarbelakangi dengan faktor ketidakmengertian dan kelalaian.
2. Sanksi pidana yaitu sanksi yang didapatkan beruapa penyiksaan atau penderitaan. Sanksi pidana terdiri dari 3 macam yang dijelaskan dalam ketentuan undang-undang perpajakan, diantaranya:
    a. Denda pidana, yang diberikan kepada pihak yang melanggar norma-norma perpajakan atau ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan. Pihak yang dapat dikenakan denda pidana diantaranya kepada wajib pajak, pejabat pajak atau pegawai Derektorat Jenderal Pajak, dan kepada pihak ketiga (bank, notaris, konsultan, asosiasi, instansi pemerintah). Denda yang

[68] Shintya Devi and Krisna Dewi, “Pengaruh Profitabilitas Pada Agresivitas Pajak Dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Moderasi", h. 20.

dikenakan kepada tindak pidana apabila sifatnya melanggar ataupun kejahatan,

b. Pidana kurungan yaitu ancaman yang diberikan kepada pihak yang melanggar, khususnya ditujukan kepada wajib pajak sebagai pihak ketiga (bank, notaris, konsultan, asosiasi, instansi pemerintah)

c. Pidana penjara, sama halnya dengan pidana kurangan, hanya saja yang membedakan pada pidana penjara ancamannya dikenakan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan, dan pidana penjara bukan ditujukan kepada pihak ketiga melainkan kepada pejabat/pegawai pajak dan wajib pajak.

Agresivitas pajak dapat diukur dengan berbagai macam cara, diantaranya dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR), *cash effective tax rate* (CETR), *book-tax difference Manzon-Plesko* (BTD_MP*), book_tax difference desai-Dharmapala* (BTD_DD) dan *tax planning.* Penelitian ini memilih menggunakan metode *effective tax rate* (ETR) untuk perhitungan rasio agresivitas pajak, alasan digunakannya metode ETR karena penelitian sebelumnya sebagian besar memilih menggunakan ETR untuk pengukuranya dengan membagi antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Selain itu, mengukur denga menggunakan ETR dapat mengetahui seberapa besar tarif pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, selanjutnya ETR digunakan sebagai proksi untuk menghitung agresivitas pajak dikarenakan ETR mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak. Kecilnya beban pajak penghasilan daripada laba sebelum pajak mengakibatkan nilai ETR yang rendah, sehingga menimbulkan peningkatan pada agresivitas pajak.[69]

[69] Prasista and Setiawan, “Pengaruh Profitabilitas Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan", h. 2131.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Asti Mariana dan Verani Carolina (2015) dengan penelitian yang berjudul *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.[70]
2. Putu Meita Prasistan dan Ery Setiawan (2016) dengan penelitian yang berjudul *Pengaruh Profitabilitas dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam BEI Tahun 2012-2014.* Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas dan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.[71]
3. Ayu Inayaturrohmah dan Indriyana Puspitosari (2019) dengan penelitian yang berjudul *Pengaruh Maqashid Syariah, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Agresivitas Pajak Pada Bank Umum Syariah yang di Indonesia 2014-2017*. Hasil penelitiannya diketahui CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. [72]
4. Azzahra Dita Reminda (2017) dengan penelitian yang berjudul *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak dengan Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI 2013-2015.* Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yaitu CSR, profitabilitas

---

[70] Astri Mariana and Verani Carolina, "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan," *Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2015): 123–36.
[71] Prasista and Setiawan, "Pengaruh Profitabilitas Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan."
[72] Inayaturrohmah and Puspitosari, "*Pengaruh Maqashid Syariah Index, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak*."

dan ukuran perusahaan mempengaruhi agresivitas pajak secara positif dan signifikan.[73]

5. Dwi Fionasari, Enni Savitri dan Andreas (2017) dengan penelitiannya yangg berjudul *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Agresivitas Pajak dengan Studi Perusahaann Lising yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016.* Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan probabilitas yang lebih dari 0,05.[74]
6. Okta S. Hartadinata dan Heru Tjaraka (2016) dengan penelitian yang berjudul *Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Manyfaktur di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2015*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pengaruh kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan kebijakan hutang berpengaruh signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak.[75]

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Di dalam kerangka ini dijelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dimana Variabel independen mencakup kebijakan hutang, profitabilitas, Corporate social Responsibility (CSR) dan variabel dependen mencakup agresivitas pajak. Keterkaitan antar variabel dinyatakan sebagai berikut:

(Variabel Independen) (Variabel Dependen)

[73] Reminda, "*Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak*"

[74] Fionasari, Savitri, and Andreas, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak."

[75] Okta S Hartadinata and Heru Tjaraka, "Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Agressiveness," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 23, no. 3 (2013): 48–59.

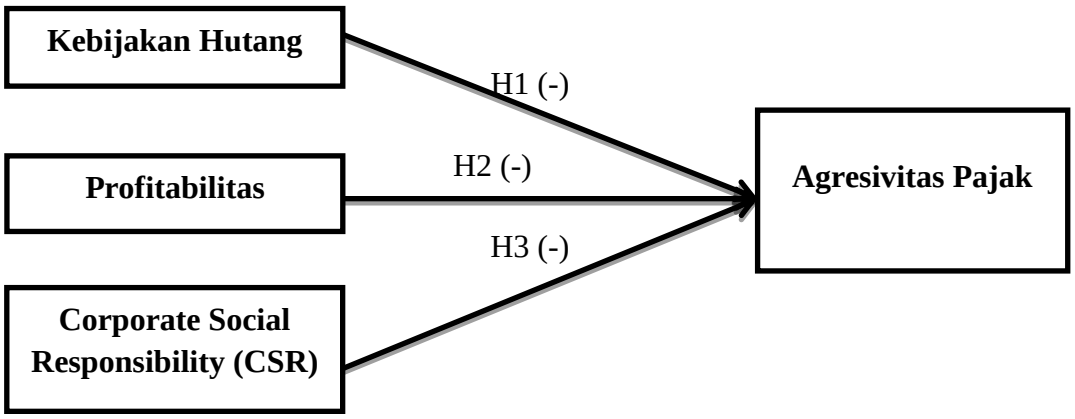

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan sesuatu yang menghubungkan antara dua variabel ataupun lebih yang secara empiris dapat diujikan sebagai hasil kesimpulan yang sementara dari sebuah penelitian. Maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. **Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Agresivitas Pajak**

   Kebijakan hutang adalah salah satu alternatif yang dipilih perusahaan untuk memenuhi pendanaannya atau juga sebagai kebijakan dari pihak manajemen untuk memilih bagaimana cara mendapatkan sumber pembiayaan yang diperuntukan untuk aktivitas operasional perusahaan. Kebijakan hutang juga dapat diartikan sebagai kebijakan perusahaan tentang seberapa jauh perusahaan menggunakan pendanaan hutang.

   Dalam perusahaan sistem pendanaan bisa dapat menimbulkan konflik antara *principal* dan *agent* sebagaimana yang dijelaskan dalam teori *agensi*. Adanya kemungkinan dari pihak *agent* menginginkan penambahan dana agar mempermudah dalam mengelola perusahaan sedangkan dari pihak *principal* tidak setuju dengan dengan adanya penambahan dana. Sehingga untuk menutupi kekurangan pendanaan dalam perusahaan, pihak *agent* mencari alternatif lainnya dalam memperoleh pendanaan lainnya. Salah satu langkah yang diambil pihak agent yaitu

melakukan pinjaman atau hutang. Akan tetapi akan terjadi teori *agens*i apabila keputusan dari *agent* untuk melakukan kebijakan hutang disetujui oleh prinsipal (pemilik perusahaan), karena prinsipal mendukung penuh tindakan agent untuk kebaikan dan kemajuan perusahaannya.[76]

Teori agensi yang menjelaskan pengaruh kebijakan hutang terhadap agresivitas pajak terdapat dalam penelitian Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2016) yang menjelaskan bahwa kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Pengaruh negatif terjadi karena perusahaan dengan kebijakan hutang tinggi maka semakin banyak pihak yang akan mengawasi, sehingga *agent* (manajemen perusahaan) akan sulit untuk melakukan tindakan pajak yang agresif, maka agent akan melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan keadaan perusahaan. Maka pemungut pajak sebagai *prinsipal* menjadi diuntungkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: H1: Kebijakan Hutang Berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas merupakan salah satu indikator dalam perusahaan yang digunakan untuk mengelola kekayaan yang ditunjukkan dengan seberapa besar penghasilan laba yang diperoleh perusahaan. Selain itu profitabilitas dapat diidentifikasikan sebagai kemampuan suatu organisasi dimasa yang akan datang dalam memperoleh keuntungan. Sedangkan ROA merupakan salah satu pendekatan yang menggambarkan besar profitabilitas dari suatu perusahaan. ROA dapat digunakan untuk mengetahui perolehan laba yang didapat dengan menggunakan seluruh jumlah aset yang dimiliki perusahaan.

[76]Qurrota A'yun, "Pengaruh Corporate Social Responsibilitu, Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak," 2019, h. 39.

Sehingga penggunaan aset untuk menghasilkan laba dianggap baik, apabila ROA perusahaan meningkat atau semakin tinggi. Teori *agensi* akan memicu dari pihak *agent* dalam memaksimalkan perolehan laba, dikarenakan keberhasilan *agent* dalam mengelola perusahaan dapat ditunjukkan dengan besarnya perolehan laba yang dihasilkan, sehingga pihak *prinsipal* (pemilik perusahaan) menjadi lebih diuntungkan karena keberhasilan *agent* dalam mengelola perusahaannya. Laba yang dihasilkan dapat mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar perusahaan, apabila perolehan laba meningkat maka beban pajak yang dibayar juga akan tinggi. [77]

Dengan adanya profitabilitas yang tinggi menjadikan perolehan laba yang tinggi pula, maka dari itu dalam teori *agensi* mengharuskan pihak *agent* untuk mengelola perusahaannya sebaik mungkin supaya dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak, dan sekaligus tidak mengurangi keberhasilan kinerja *agent*.[78]

Teori *agensi* yang menjelaskan pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak terdapat dalam penelitian terdahulu di lakukan oleh Kandaka dan Raisa Pratiwi (2018), dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Terjadi pengaruh negatif karena terjadi keserasian antara pihak *agent* (manajemen perusahaan) dan pemungut pajak (*prinsipal*), dimana dengan adanya laba yang tinggi maka *agent* tidak akan mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga *prinsipal* (pemungut pajak) merasa diuntungkan dengan perolehan laba perusahaan yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas maka diturunkan hipotesis sebagai berikut: H2: Profitabilitas Berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak.

---

[77] Inayaturrohmah and Puspitosari, “Pengaruh Maqashid Syariah Index, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak", h. 48.

[78]Qurrota A’yun, “Pengaruh Corporate Social Responsibilitu, Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak,” 2019, h. 39.

3. **Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Agresivitas Pajak**

Corporate Social Responsibility (CSR) disebut sebagai suatu bentuk kepedulian sosial sebuah perusahaan untuk melayani kepentingan organisasi eksternal dan publik. Dan bisa didefinisikan sebagai kewajiban sosial yang diberikan oleh suatu perusahaan dan diterima oleh masyarakat serta pemerintah karena adanya pengaruh negatif yang disebabkan oleh perluasan usahanya, yang kemungkinan sudah menganggu keadaan lingkungan dan sosial di dalam masyarakat pada saat melakukan aktivitas.

CSR merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan sosialnya dan adanya hubungan kontak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dan pengungkapan sosial lingkungan. CSR ini menjelaskan bagaimana perusahaan dalam menjalankan usahanya yang sesuai dengan batasan, norma, dan nilai sosial, sehingga perusahaan akan terdorong untuk lebih memperhatikan lingkungannya.[79]

Adanya tindakan pajak yang agresif sesungguhnya tidak selaras dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, serta secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat karena terbatasnya fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah yang disebabkan oleh rendahnya penerimaan pajak. Tindakan agresivitas pajak juga mencerminkan sikap yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dikarenakan hanya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi disisi lain tindakan tersebut dapat merugikan negara karena menyebabkan penurunan pendapatan negara atas pajak.[80]

Dalam teori *agensi*, pihak *agent* (manajemen perusahaan) akan melakukan tindakan CSR, dimana perusahaan yang melakukan yang melakukan CSR mencerminkan perusahaan yang tanggung jawab terhadap

[79] Prasista and Setiawan, “Pengaruh Profitabilitas Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan", h. 2127.

[80] Gunawan, “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak", h. 427.

sosial tinggi, sehingga perusahaan tersebut tidak akan melakukan tindakan agresivitas pajak yang merugikan *prinsipal* (pemungut pajak).

Dalam penelitian Dwi Fionasari, Enni Savitri dan Andreas (2017) yang mengungkapkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dengan adanya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa *agent* (manajemen perusahaan) telah berhasil mengelola perusahaannya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di sosial. Perusahaan dengan tindakan agresivitas rendah maka akan menimbulkan pengaruh yang positif kepada *prinsipal* (pemungut pajak) Sehingga dengan pengungkapan CSR yang tinggi dan agresivitas pajak yang rendah maka akan menimbulkan keterkaitan antara *agent* (manajemen perusahaan) dan *prinsipal* (pemungut pajak).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui (adanya suatu masalah yang membutuhkan jawaban yang sesuai) secara teliti, kritis dalam mencari fakta-fakta dengan menggunakan langkah-langkah tertentu.[81]Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang diukur dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistics 19. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan tehnik statistik. Sedangkan metode penelitian kuantitatif yaitu suatu cara untukk mendapatkan ilmu pengetahuan atau pemecahan masalah yang dihadapi yang dilakukan dengan cara hati-hati dan sistematis, mempunyai rancangan yang rigid (tidak mudah untuk dirubah), dan datanya lebih banyak menggunakan angka dari pada gambar atau kata-kata.[82]

3.2 Sumber Data

Sumber data adalah tahapan dari penelitian kuantitatif maupun kualitatif dalam bentuk informasi yang di dalamnya memuat sesuatu yang abstrak, berwujud nyata atau terdapat peristiwa/gejala.[83] Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder, sumber data sekunder yaitu sumber data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung melalui media perantara yang dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dilaporkan oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) melalui *website* perusahaan atau situs www.idx.co.id dengan interval waktu 2014-2019.

---

[81]Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2008), h. 3.

[82] *Ibid*., h. 21.

[83] Risma Cahyani, *Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 46.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi yaitu kumpulan unit atau keseluruhan gejala yang ingin diteliti. Populasi merupakan salah satu konsep yang berhubungan erat dengan sampel.[84] Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada periode 2014-2019, dengan total keseluruhan populasinya yaitu sebanyak 33 perusahaan. Dikarenakan populasinya yang luas, maka peneliti mengambil sampel (bagian dari populasi) yang sesuai dengan kriteria yang akan diteliti.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini meliputi perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 2014-2019. Dalam penelitian ini pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan tehnik sampling dengan non probability sampling yaitu tehnik yang tidak memberikan peluang sama untuk anggota dari populasi yang telah terpilih menjadi sampel, serta dalam penelitiaan ini tehnik *purposive sampling* digunakan dalam penentuan sampel. Tehnik *purposive sampling* adalah tehnik untuk menentukan sampel yang didasari oleh pertimbangan tertentu.[85] Kriteria yang menjadi pertimbangan dari penentuan sampel dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2014-2019.
2. Perusahaan pertambangan berbasis syariah yang tidak mengalami *delisting* (penghapusan saham dari ISSI) selama periode 2014-2019.
3. Perusahaan pertambangan berbasis syariah yang memplubikasikan *annual report* secara lengkap selama periode 2014-2019.

---

[84]Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, h. 104*.
[85] *Ibid*., h. 118.

4. Perusahaan pertambangan berbasis syariah dengan kepemilikan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah tahap dari penelitian dengan dilakukannya beberapa rangkaian aktivitas diantaranya dengan bertemu responden yang diteliti dan memberikan angket kepada mereka serta memintanya untuk mengisi (apabila memakai angket sebagai sarana penelitian), mengamati kegiatannya (apabila memakai petunjuk pengamatan seperti daftar cek), dan menulis angka-angkanya ataupun kata yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti (apabila dokumentasi digunakan sebagai petunjuk) ataupun kegiatan lain yang relevan.[86]

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dikumpulkannya data melalui dokumentasi dengan dilakukannya pengumpulan data serta fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan dengan mempelajari, menelaah, dan meneliti. Peneliti menggunakan dokumen yang sudah jadi (laporan keuangan tahunan perusahaan). Laporan keuangan tahunan diperoleh dari *website* perusahaan itu sendiri atau dari akses www.idx.co.id.

3.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel adalah karakteristik yang bisa diduplikasikan ke dalam, sekurang-kurangnya dua klasifikasi atau indikator. Variabel dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang keadaannya dapat dinyatakan secara numeric.[87] Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu: Variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Definisi operasional variabel sebagai berikut:

3.5.1 Variabel Independen (variabel bebas)

Variabel independen (bebas) disebut juga *antecedent* variabel, adalah variabel sebagai penjelas , penentu, atau penduga. Atau istilah lainnya

[86] *Ibid*., h. 185.
[87] Maulana, *Pengaruh ROA, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance, h. 47*.

dapat dikatakan sebagai variabel yang menjadi penyebab dari terjadinya atau dapat berpengaruh terhadap variabel lainnya.[88] Variabel independen yang digunakan peneliti antara lain:

1) Kebijakan Hutang

Kebijakan hutang adalah kebijakan dari pihak manajemen perusahaan dalam mengambil langkah untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang diperuntukan untuk kegiatan pengelolaan perusahaan, atau bisa diartikan sebagai kebijakan perusahaan tentang seberapa jauh perusahaan menggunakan pendanaan hutang.

Dalam penelitian ini, rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR) digunakan untuk mengukur kebijakan hutang. Rasio ini dapat mengukur besarnya hutang perusahaan jika dibandingkan dengan modal perusahaan sendiri. Semakin tinggi rasio DAR maka menggambarkan resiko keuangan perusahaan semakin membesar, dan sebaliknya.[89] Secara sistematis raio ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\mathbf{DAR = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Asset}}$$

2) Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan pada waktu yang akan datang dalam memperoleh keuntungan, atau istilah lainnya yaitu indikator untuk menentukan kesuksessan perusahaan selama masa operasionalnya. Sedangkan rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan sebagai penilaian mampu dan tidaknya perusahaan untuk mendapatkan laba. Ukuran tingkat efektivitas dari manajemen juga dapat digambarkan dengan rasio ROA (*Return On Asset*), yaitu dengan

[88] Cahyani, *Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak, h. 35*.

[89] Sofi, *Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang Dengan Kebijakan Deviden Sebagai Variabel Moderasi, h. 61*.

melihat perolehan keuntungan selama proses penjualan serta perolehan investasi.[90]

Rasio ROA (*Return On Asset*) digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROA merupakan rasio yang diukur dengan membandingkan laba bersih sebelum pajak dengan keseluruhan total aset diakhir periode.

Apabila rasio ROA tinggi maka menunjukkan laba yang diperoleh perusahaan juga semakin tinggi sehingga pengelolaan aset perusahaan dapat dikatakan cukup baik.

Rumus yang digunakan untuk mengukur yaitu:

$$\textbf{ROA} = \frac{\textbf{\textit{Laba bersih sebelum pajak}}}{\textbf{\textit{Total Aset}}}$$

3) Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai pertanggung jawaban perusahaan baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Tanggung jawab untuk pihak internal perusahaan seperti kepada *stakeholder* serta staf anggota (pegawai) dalam bentuk perolehan laba dan perkembangan dari perusahaan. Sedangkan tanggung jawab untuk pihak eksternal perusahaan yaitu dihubungkan dengan peran perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja serta pembayar pajak, kesejahteraan dan kompetensi masyarakat yang ditingkatkan, dan pemeliharaan lingkungan untuk generasi yang akan datang. [91]

Pengukuran CSR dalam penelitian ini yaitu diukur dengan GRI-G4 yang terdapat total 91 item. Apabila suatu perusahaan mengungkapkan item maka diberi nilai 1 dan apabila tidak maka

[90] Rinaldi and Charoline Cheisviyanny, "Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance," *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, no. c (2015): 472–83, h. 352.

[91] Qurrota A'yun, "Pengaruh Corporate Social Responsibilitu, Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak," 2019, h. 20.

dinilai 0. Pemberian nilai tersebut kemudia dijumlahkan dan didapatkanlah total item CSR. Selanjutnya total item yang diungkapkan masing-masing dimensi dibandingkan dengan total maksimal item yang diungkapkan. Total maksimal item untuk dimensi ekonomi 9, dimensi lingkungan 34, dan dimensi sosial 48.[92] Rumus untuk pengungkapan CSR yaitu

$$CSRIj : \frac{\Sigma Xyi}{ni} \times 100\ \%$$

Keterangan:

CSRIj : Corporate Social Responsibility Disclosure Index Perusahaan

ni : Total item yang diungkapkan, ni ≤ 91

Xyi : dummy variabel: 1= apabila item 1 diungkapkan, 0 = apabila item 1 tidak diungkapkan. Maka demikian 0 ≤ CSRI ≤ 1

3.5.2 Variabel Dependen (variabel terikat)

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel konsekuensi atau akibat, atau dapat dikatakan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Agresivitas pajak digunakan peneliti sebagai variabel dependen. Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan secara legal ataupun illegal oleh wajib pajak dengan tujuan supaya beban pajak yang ditangguhkan dapat dibayarkan seminimal mungkin. Untuk mengukur agresivitas pajak yaitu menggunakan model *Effective Tax Rate (*ETR). Dalam penelitian ini proksi utamanya yaitu ETR, ETR menunjukkan persentase keseluruhan jumlah beban pajak penghasilan yang dibebankan kepada perusahaan dari keseluruhan jumlah pendapatan sebelum pajak. Besar kecilnya niali ETR ditentukan dengan prosentase 25%. Apabila nilai ETR lebih rendah dari 25% maka menunjukkan adanya tindakan pajak yang agresif, dan sebaliknya jika ETR lebih tinggi dari 25% maka agresivitas pajaknya rendah. Penyebab ETR rendah

[92] *Ibid.,* h. 43.

karena pendapatan sebelum pajak yang lebih besar dari beban pajak penghasilan.[93] Rumus yang digunakan yaitu:

$$ETR = \frac{\textit{Beban Pajak Penghasilan}}{\textit{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Keterangan:

ETR :Ukuran beban pajak perusahaan yang menunjukkan tingkat pajak yang dibayarkan atas laba perusahaan.

Beban Pajak Penghasilan : Ukuran beban pajak perusahaan yang menunjukkan tingkat pajak yang dibayarkan atas laba perusahaan.

Pendapatan Sebelum Pajak : Pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan

3.6 Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian ini, tehnik analisis yang digunakan yaitu pengujian yang dilakukan dengan analisis regresi linear berganda, yaitu suatu metode yang umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menganalisis keterkaitan antara beberapa variabel independen dengan sebuah variabel dependen. Dalam menganalisis data ini dibantu dengan menggunakan program aplikasi SPSS. Berdasarkan data olahan SPSS yang meliputi kebijakan hutang, profitabilitas, dan corporate social responsibility dan agresivitas pajak. Tehnik-tehnik yang digunakan meliputi:

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui deskripsi dan gambaran dari yang akan diteliti dengan melihat mean, standar devisiasi, varian, maksimum, minimum, sum,dan range. Tehnik ini dimaksudkan agar dapat mendapatkan gambaran tentang distribusi serta perilaku data sampel. Statistik deskriptif merupakan suatu bagian dari statistika yang mempelajari tentang cara mengumpulkan data dan menyajikan data untuk mempermudah dipahami. Atau dengan definisi lain dapat diartikan sebagai metode yang berkaitan dengan

[93] *Ibid.,* h. 44.

pengumpulan dan penyajian data, sehingga data memberikan suatu informasi yang menggambarkan dan mendiskripsikan variabel dalam penelitian.[94]

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Model regresi linear dikatakan baik apabila memenuhi uji asumsi klasik. Maka dari itu, untuk sebelum menganalisis regresi maka memerlukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik meliputi:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal dapat dikatakan data yang baik. Untuk mendeteksi normal dan tidaknya residual terdistribusi, dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu menggunakan uji *kolmogorov* (K-S) dan menggunakan grafik *probability plot* (P-P *Plot*).

Dalam menentukan pengujian kolmogorav dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 (< 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal, sedangkan data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikasi lebih dari 0,05 (> 0,05).[95]

Dalam pengujian menggunakan grafik *probability plot* (P-P *Plot*) dilakukan dengan melihat dan mendeteksi penyebaran dari datanya (titik) terhadap sumbu diagonal yang terdapat pada grafik P-P Plot. Berikut cara menentukan grafik P-P Plot:[96]

1. Apabila penyebaran data berdekatan pada sekitar garis diagonal dan mengikuti arah dari garis diagonalnya maka dapat dikatakan bahwa

---

[94]Cahyani, *Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak, h.56*.

[95] Nuryadi, *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*, Cet. Ke 1 (Yogyakarta: Gramasurya, 2017), h. 80.

[96] Cahyani, *Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak, h. 48*.

data tersebut berdistribusi secara normal, dan disimpulkan bahwa data sesuai dengan asumsi normalitas.

2. Apabila penyebaran data menjauh dari garis diagonalnya dan tidak mengikuti arah dari garis diagonalnya, maka data tersebut terdistribusi dengan tidak normal, dan dapat disimpulkan bahwa data tidak sesuai dengan asumsi normalitas.

3.6.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan sebagai penguji ditemukannya atau tidak korelasi diantara variabel independen pada model regresi. Multikolonieritas merupakan situasi adanya korelasi pada beberapa variabel independen antara satu dengan yang lainnya. Model regresi dikatakan baik apabila antara variabe independen tidak terdapat korelasi.[97]

Cara yang dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas pada model regresi yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dari kedua nilai tersebut maka dapat diketahui apakah ada variabel independen yang dijelaskan pada variabel independen lain. Dapat dijelaskan bahwa sebelum diregres terhadap variabel independen lainnya, maka dilakukan perubahan terdahulu dari variabel independen menjadi variabel dependen. Variabilitas variabel independen yang dipilih tetapi tidak dijelaskan dalam variabel independen lainnya dapat diukur dengan menggunakan *tolerance*. Maka dari itu, nilai VIF tinggi menunjukkan rendahnya nilai *tolerance* (VIF = 1/ *Tolerance*). Dalam mengetahui *multikolinearitas* pada umumnya menggunakan nilai *cutoff*, yaitu nilai *tolerance* $\leq$ 0,10 sama halnya dengan nilai VIF $\leq$ 0,10. Dan apabila *tolerance* $\geq$ 0,10 dan nilai VIF $\leq$ 10 maka menunjukkan tidak terjadinya

[97] *Ibid.*, 48.

multikolonieritas. Sebaliknya apabila terjadi multikolonieritas maka ditunjukkan dengan nilai *tolerance* ≤ 0,1 dan nilai VIF ≥ 10.[98]

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk pengujian dalam menentukan ada dan tidaknya korelasi pada model regresi antara kesalahan yang menganggu terhadap periode t dengan kesalahan penganggu periode t sebelumnya. Munculnya korelasi menjadi penyebab terjadinya problem autokorelasi. Autokorelasi terjadi dikarenakan adanya observasi yang berturut-turut sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama lain. Salah satu cara untuk menentukan apakah terdapat autokorelasi yaitu dengan melalui uji *run tes.*

Untuk menentukan ada dan tidaknya korelasi dalam uji *run test* yaitu dengan melihat nilai signifikannya. Berikut pengambilan keputusan mengenai pengujian autokorelasi dengan uji *run test*:

1. Apabila nilai dari *Asymp. Sig.* (2-tailed) kurang dari 0,05, maka terjadi korelasi atau HO ditolak.
2. Apabila nilai dari *Asymp. Sig*. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka tidak terjadi korelasi atau HO diterima.

3.6.2.4 Uji *Heteroskedastisitas*

Uji *heteroskedastisitas* dilakukan untuk pengujian dan mengetahui apakah di dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Adanya *homoskedastisitas* apabila tidak berubahnya varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain, dan sebaliknya apabila berubah maka terjadi *heteroskedasitas.* Terdapat *homoskedastisitas* menandakan jika model regresinya baik, dan apabila terdapat *heterokedastisitas* maka model regresi tidak baik.[99]

---

[98] *Ibid*., 49.
[99] *Ibid*., h. 49.

Salah satu cara untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas yaitu dengan uji gletser. Uji gletser merupakan suatu cara dengan meregresi antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Dan apabila variabel independen dengan nilai absolut residualnya memiliki nilai signifikan yang lebih dari 0,05, maka hal itu menunjukkan terjadinya masalah *heteroskedastisitas*. Uji *heteroskedastisitas* dengan uji gletser, dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai Sig variabel independen < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas, dan jika nilai Sig variabel independen > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.[100]

3.6.3 Uji Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah, atau pengertian lainnya yaitu dugaan mengenai sesuatu hal. Hipotesis digunakan untuk menyimpulkan sementara mengenai hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Sedangkan uji hipotesis merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengeahui kevalidan hipotesis statistika suatu populasi dengan data yang digunakan dari sampel populasi.[101] Analisis uji hipotesis dalam penelitian ini dibagi menjadi empat, yaitu:

3.6.3.1 Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan supaya dapat mengidentifikasi besarnya variabel independen mempengaruhi variabel dependen.[102] Penelitian ini dilakukan untuk pengujian apakah terdapat pengaruh antara kebijakan hutang (dengan proksi *debt to equity ratio*), Profitabilitas (dengan proksi *Return on Asset*), dan Corporate Social responsibility (dengan proksi *Corporate Social Responsibility*

---

[100] *Ibid*., h. 51.

[101] Nuryadi, *Dasar-Dasar Statistik Penelitian, h. 74*.

[102] Cahyani, *Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak, h. 51*.

Disclosure Index) terhadap agresivitas pajak perusahaan (dengan proksi *Effective Tax Rate*). Rumus dari persamaan regresi antara lain:

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + e}$$

Keterangan:

Y : Agresivitas Pajak Perusahaan

X1 : Koefisien Kebijakan Hutang

X2 : Koefisien Profitabilitas

X3 : Koefisien Corporate Social Responsibility (CSR)

α : Konstanta

β : Koefisien yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen

e : Eror term atau kesalahan penganggu

3.6.3.2 Uji Koefisien determinan (R^2)

Koefisien determinan digunakan untuk menghitung seberapa jauh kemampuan modal dalam mengungkapkan variasi variabel dependen. Angka antara nol dan satu merupakan nilai dari koefisien determinan. Nilai koefisien determinan yang kecil (mendekati angka nol) menunjukkan terbatasnya kemampuan dari variabel independen di dalam menerangkan variabel dependen. Dan sebaliknya, nilai yang besar (mendekati angka satu) menunjukkan bahwa informasi mengenai prediksi dari variabel dependen hampir sepenuhnya disediakan oleh varaibel independen.[103]

3.6.3.3 Uji Signifikan simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengukur apakah jika variabel independen diletakkan ke dalam model dapat berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Uji F menunjukkan bahwa model dalam penelitian diterima atau ditolak dengan derajat kepercayaan yang

[103] *Ibid*., h. 52.

digunakan adalah 0,05. Kriteria yang digunakan dalam pengujian,[104]sebagai berikut:

1. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas < nilai signifikan (< 0,05), menunjukkan bahwa hipotesis ditolak/tidak diterima, artinya secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas < nilai signifikan (> 0,05), maka dinyatakan bahwa hipotesis diterima, yang artinya secara simultan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6.3.4 Uji Regresi Parsial *(*Uji Statistik t*)*

Uji statistik t adalah pengujian dalam mengetahui besarnya pengaruh dari satu variabel independen secara individual dalam menngidentifikasikan variasi variabel dependen. Atau dapat dikatakan bahwa uji statistik t digunakan untuk menjelaskan keterkaitan secara parsial antara variabel independen dan dependen, serta menjelaskan apakah hipotesis diterima atau tidak, dengan derajat signifikansinya yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan[105] sebagai berikut:

1. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan < 0,05, maka Ho ditolak, artinya suatu variabel independen secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai signifikan > 0,05, maka Ho diterima, yang artinya bahwa suatu variabel independen secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

[104] Shintya Devi and Krisna Dewi, “Pengaruh Profitabilitas Pada Agresivitas Pajak Dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Moderasi" h. 56.
[105] *Ibid*., h. 67.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara kebijakan hutang, profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2014-2019.

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011. ISSI merupakan indeks saham yang menggambarkan keseluruhan saham syariah yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Konstituen ISSI merupakan keseluruhan saham syariah yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) dan dirilis oleh OJK. Konstituen ISSI penyeleksiannya dilakukan ulang yaitu sebanyak dua kali disetiap tahunnya, yaitu pada bulan Mei dan November (mengikui jadwal review DES). Selanjutnya setelah itu, OJK menerbitkan daftar perusahaannya dan setiap penyeleksiannya akan ada saham syariah yang masuk dan keluar dari konstituen ISSI. Dengan adanya penyeleksian tersebut untuk memastikan bahwa perusahaan yang masuk ke dalam ISSI terhindar dari kepemilikan portofolio yang tidak halal seperti: perjudian, perdagangan yang dilarang syariah, jual beli yang mengandung unsur gharar dan maysir, jasa keuangan yang riba, dan transaksi yang mengandung suap.

Perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam ISSI yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 6 perusahaan selama periode 2014-2019, sebagai berikut:

Tabel 2

Daftar Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Dalam *Indeks Saham Syariah Indonesia* (ISSI) Periode 2014-2019

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan

1	PTBA	PT. Bukit Asam Tbk
2	ITMG	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
3	ELSA	PT. Elnusa Tbk
4	ADRO	PT. Adaro Energy Tbk
5	TOBA	PT. Toba Bara Sejahtera Tbk
6	DSSA	PT. Dian Swastika Tbk

Sumber: idx.co.id

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Variabel yang dideskripsikan dalam penelitian ini diantaranya variabel kebijakan hutang (X1), variabel profitabilitas (X2), variabel Corporate Social Responsibility (CSR) (X3) dan variabel agresivitas pajak (Y) . Berikut penyajian tabel terkait hasil dari statistik deskripsi pada variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini:

Tabel 3

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Statistics					
		Kebijakan Hutang (X1)	Profitabilitas (X2)	CSR (X3)	Agresivitas Pajak (Y)
N	Valid	36	36	36	36
	Missing	0	0	0	0
Mean		,4352	,1284	,4072	,3201
Median		,4255	,1170	,3960	,3010
Mode		,25[a]	,10[a]	,37[a]	,26[a]
Std. Deviation		,09815	,07132	,10179	,12323
Variance		,010	,005	,010	,015
Range		,47	,27	,66	,78
Minimum		,25	,01	,22	,07
Maximum		,72	,28	,88	,86
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown					

Sumber: Hasil data sekunder (diolah oleh SPSS’19).

Berdasarkan tabel 3 maka dapat dideskripsikan bahwa keseluruhan N (jumlah data yang valid atau dapat diproses) pada setiap variabel adalah 36 sampel selama periode tahun 2014-2019, hal tersebut menunjukkan bahwa semua data pada tiap variabel dapat diproses dan tidak ada yang hilang.

Pada variabel X1 (DAR/kebijakan hutang) menunjukkan bahwa nilai N adalah 36 sampel. Nilai minimum atau terkecil sebesar 0,25 yang artinya nilai terkecil dari variabel tersebut adalah Rp 0,25 ,dan nilai maksimum sebesar 0,72 yang artinya nilai terbesar dari variabel tersebut adalah Rp 0,72. Nilai mode atau nilai yang sering muncul divariabel X1 sebesar 0,25, Sedangkan mean yang merupakan besaran nilai rata-rata pada variabel X1(DAR/kebijakan hutang) yaitu 0,4352. Dan nilai standar devisiasi atau standar simpangan baku menunjukkan nilai 0,09815 (berada dibawah rata-rata), yang artinya penyimpangan datanya sedikit karena perubahan datanya tidak bergerak secara variatif. Nilai median atau nilai tengah yaitu 0,4255 dan nilai mean sebesar 0,4352, nilai mean berada lebih tinggi daripada nilai median sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata variabel kebijakan hutang tergolong tinggi.

Pada variabel X2 (ROA/profitabilitas) menunjukkan bahwa nilai N adalah 36 sampel. Nilai minimum dari variabel tersebut sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 0,28. Nilai mean atau rata-ratanya yaitu sebesar 0,1284, sedangkan nilai dari standar devisiasi atau standar penyimpangan yaitu 0,07132 (dibawah rata-rata), artinya bahwa penyimpangan datanya sedikit karena perubahan data tidak bergerak secara variatif . Nilai mode atau nilai yang sering muncul yaitu 0,10. Nilai median atau nilai tengah sebesar 0,1170 dan nilai mean sebesar 0,1284.Nilai mean lebih tinggi dari nilai median, hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata variabel profitabilitas tergolong tinggi.

Pada variabel X3 (*Corporate Social Responsibility* (CSR)) diperoleh hasil nilai N yaitu 36 sampel yang terdiri dari nilai minimum sebesar 0,22 dan nilai maksimum sebesar 0,88. Nilai mean yang merupakan nilai rata-rata yaitu sebesar 0,4072 dengan nilai standar devisiasi atau standar penyimpangan

menunjukkan nilai 0,10179 (di bawah rata-rata) yang artinya bahwa penyimpangan datanya sedikit karena perubahan data tidak bergerak secara variatif. Nilai mode atau nilai sering mucul sebesar 0,37, nilai median yang merupakan nilai tengah yaitu 0,3960 sedangkan nilai mean 0,4072. Nilai mean lebih besar dari nilai median, hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) tergolong tinggi.

Pada variabel Y (ETR /indikator agres ivitas pajak) diperoleh hasil bahwa nilai N yaitu 36 sampel dengan nilai minimum sebesar 0,07 dan nilai maksimum sebesar 0,86. Selanjutnya nilai mean yang merupakan nilai rata-rata dari variabel Y yaitu sebesar 0,3201dengan nilai standar devisiasi atau standar penyimpangan yang menunjukkan nilai 0,12323 (di bawah rata-rata), yang artinya bahwa penyimpangan datanya sedikit karena adanya perubahan data yang tidak bergerak secara variatif. Nilai mode atau nilai yang sering muncul yaitu 0,26 dan nilai median atau nilai tengah yaitu 0,3010, sedangkan nilai mean 0,3201. Nilai mean lebih tinggi dari nilai median, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata ETR/ indikator variabel Y tergolong tinggi yang artinya rata-rata tingkatan agresivitas pajak tergolong rendah (karena ETR dan agresivitas pajak sifatnya berlawanan). Dilihat juga dari penentu ETR yaitu 25%, dimana apabila nilai ETR di bawah 25% maka dapat disimpulkan terjadi tindakan agresivitas pajak. Melihat nilai mean 0,3201 atau 32,01% maka nilai mean diatas 25% sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan agresivitas pajaknya rendah.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual terdapat distribusi normal. Berikut hasil dari dilakukannya pengujian normalitas:

Tabel 4

Hasil dari Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,08614320
Most Extreme Differences	Absolute	,095
	Positive	,095
	Negative	-,074
Test Statistic		,569
Asymp. Sig. (2-tailed)		,902
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.		

Sumber: Data sekunder yang diolah, SPSS'19.

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai statistik sebesar 0,569 sedangkan nilai signifikan sebesar 0,902. Angka nilai signifikan dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05, maka hal tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam pengujian yang telah dilakukan terdapat nilai residual terdistribusi normal. Grafik untuk menguji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan grafik P-P Plot (Probability Plot).

Gambar 1

Grafik P-P Plot

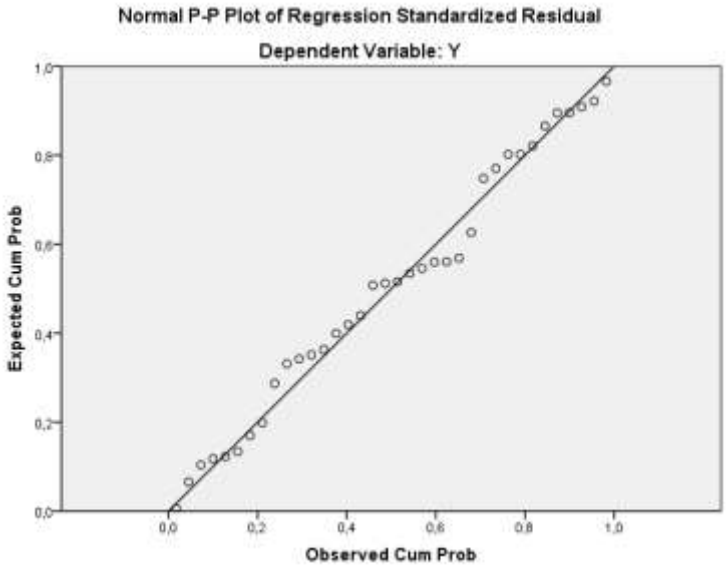

Sumber: Gambar dari SPSS'19.

Gambar 1 pada grafik "*Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*" menunjukkan bahwa titik-titik ploting yang menyebar tidak jauh dari garis diagonal (selalu mengikuti dan mendekati garis diagonal) maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya variabel bebas (independent). Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terdapat korelasi diantara variabel bebas. Ada dan tidaknya multikolonieritas dalam penelitian ini, maka dapat diketahui dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) seperti tabel berikut ini:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients[a]			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	,703	1,423
	X2	,861	1,162
	X3	,755	1,325
a. Dependent Variable: Y			

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS'19.

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai tolerance dan nilai VIF dari variabel dependen meliputi kebijakan hutang (X1) dengan nilai tolerance 0,703 dan nilai VIF 1,423, profitabilitas (X2) memiliki nilai tolerance sebesar 0,861 dan nilai VIF sebesar 1,162 sedangkan kebijakan hutang (X3) besarnya nilai tolerance yaitu 0,755 dan nilai VIF yaitu 1,325. Keseluruhan variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai dari VIF yaitu < 10.

Dengan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel bebas (independent) dalam penelitian ini terhindar dari gejala multikolonieritas.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terjadi korelasi diantara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya.Apabila terjadi korelasi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linear terdapat problem autokorelasi. Model regresi dalam pengujian ini dapat dikatakan baik apabila tidak terdapat autokorelasi yang dilakukan dengan uji *run test*. Berikut hasil pengujian dari uji *run test*:

Tabel 6
Hasil dari Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value[a]	,00313
Cases < Test Value	18
Cases >= Test Value	18
Total Cases	36
Number of Runs	13
Z	-1,860
Asymp. Sig. (2-tailed)	,063
a. Median	

Sumber: Data sekunder yang diolah (SPSS'19)

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai signifikan (Asymp. Sig.) yaitu 0,063, dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan 0,05 (0,063 > 0,05). Dengan adanya pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (HO) diterima dan tidak terjadi autokorelasi diantara nilai residual.

4.3.4 Uji *Heteroskedastisitas*

Pengujian *heteroskedastisitas* dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lainnya, dan sebaliknya apabila terdapat persamaan maka disebut *homokedastisitas*. Model regresi dapa dikatakan baik apabila terjadi h*omokedastisita*s atau tidak terjadi *heteroskedastisitas.*

Tabel 7

Hasil dari Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Gletser

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,088	,052		1,678	,103
	X1	-,087	,101	-,159	-,856	,398
	X2	-,372	,111	-,330	-2,359	,051
	X3	,134	,094	,256	1,424	,164
a. Dependent Variable: Abs_RES						

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS'19

Tabel 7 pengujian *heteroskedastisitas* dengan uji gletser dan dilihat dari nilai signifikan, nilai dari variabel-variabel dependen meliputi kebijakan hutang (X1) yaitu 0,398, profitabilitas (X2) yaitu 0,051 dan kebijakan hutang (X3) yaitu 0,164. Keseluruhan nilai signifikan dalam tiap variabel menghasilkan nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 (> 0,05). Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dari tiga variabel tersebut tidak terdapat gejala *heteroskedastisitas*.pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk mengetahui adanya agresivitas pajak. Pengujian mengenai *heteroskedastisitas* juga dapat dilakukan dengan grafik *scattersplot*.

Gambar 2
Grafik Scatterplot

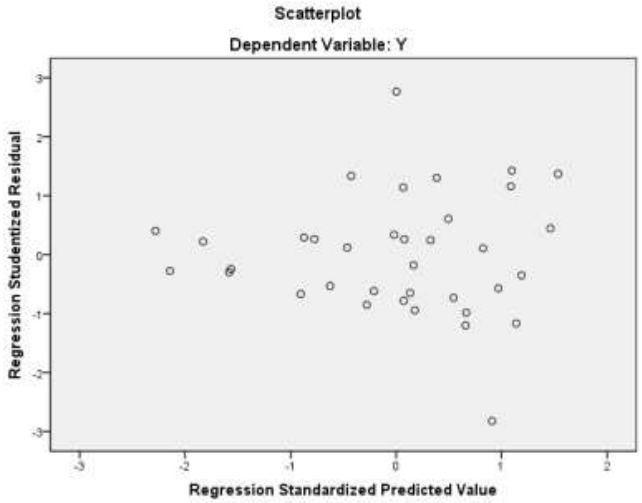

Sumber: Grafik yang diolah, SPSS'19

Gambar 2 hasil pengolahan grafik untuk pengujian heteroskedastisitas. Hasil grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik atau lingkaran kecil tersebar secara acak baik berada di atas maupun di bawah dengan angka 0 pada sumbu Y serta tidak terbentuk suatu pola tertentu. Maka menunjukkan bahwa dalam grafik tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Sehingga model regresi ini layak digunakan untuk mengetahui agresivitas pajak dengan menggunakan variabel independen yaitu kebijakan hutang, profitabilitas, dan CSR.

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Regresi Linear Berganda

Pengujian regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh efisiensi kebijakan hutang, profitabilitas, dan CSR terhadap agresivitas pajak. Hasil mengenai nilai dari regresi linear berganda dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 8

Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-,133	,095		-1,399	,171

	X1	,387	,185	,308	2,090	,045
	X2	,171	,230	,099	1,757	,049
	X3	,656	,172	,542	3,808	,001
a. Dependent Variable: Y						

Sumber: Data sekunder yang diolah, SPSS'19.

Tabel 8 menghasilkan olahan data dari pengujian regresi linear berganda dan diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + e$

Y = - 0,133 + 0,387.DAR + 0,171 .ROA + 0,656 . CSR + e

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai dari konstanta (α) yaitu – 0,133 yang menyatakan apabila variabel independen (kebijakan hutang, profitabilitas dan CSR) nilainya sama dengan 0 maka nilai konstanta dapat menurunkan nilai ETR (pengukur agresivitas pajak) sebesar 0,133.
2. Nilai dari koefisien X1 (kebijakam hutang/DAR) bernilai positif sebesar 0,387, menunjukkan apabila setiap penambahan 1 nilai pada variabel kebijakan hutang, maka akan diikuti oleh peningkatan nilai pada ETR (pengukur agresivitas pajak) sebesar 0,387.
3. Nilai dari koefisien X2 (profitabilitas/ROA) bernilai positif yaitu 0,171, menunjukkan apabila setiap penambahan 1 nilai pada variabel profitabilitas, maka diikuti dengan peningkatan nilai pada ETR (pengukur agresivitas pajak) sebesar 0,171.
4. Nilai dari koefisien X3 (CSR)bernilai positif yaitu 0,656, yang menunjukkan jika setiap penambahan 1 nilai pada variabel CSR, maka akan diikuti oleh peningkatan nilai pada ETR (pengukur agresivitas pajak) sebesar 0,656.

4.4.2 Uji Koefisien Determinan

Pengujian koefisien determinan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dari model dalam mengungkapkan variabel dependen. Hasil dari pengujian koefisien determinan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9
Hasil dari Uji Koefisien determinan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,715[a]	,511	,465	,090
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 b. Dependent Variabel: Y				

Sumber: Data sekunder yang diolah, SPSS'19.

Data yang diolah dalam tabel 9 menunjukkan bahwa perolehan dari nilai R *square* yaitu sebesar 0,511. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan dari variabel independen (kebijakan hutang, profitabilitas dan CSR) dalam menjelaskan variabel dependen (agresivitas pajak) yaitu sebesar 51.1% sedangkan sisanya yaitu 50,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini.

4.4.3 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji Signifikan simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah jika keseluruhan variabel dependen (kebijakan hutang, profitabilitas dam CSR) dimasukkan ke dalam model secara bersamaan dapat mempengaruhi variabel independen (agresivitas pajak). Untuk mengetahui uji F maka diperlukan pengolahan data dan memperoleh hasil seperti tabel di bawah ini:

Tabel 10
Hasil Uji Signifikan Simultan

ANOVA[b]						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,272	3	,091	11,160	,000[a]

	Residual	,260	32	,008		
	Total	,531	35			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data sekunder yang diolah (SPSS'19)

Tabel 10 menunjukkan bahwa perolehan hasil dari F_{tabel} sebesar 2,87 dan F_{hitung} sebesar 11,160 dengan hasil F_{hitung} (11,160) > F_{tabel} (2,87), sedangkan nilai signifikan dalam tabel tersebut menunjukkan nilai 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (sig. 0,000 < 0,05) (signifikan). Dengan ada pertanyataan dari hasil tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan hutang (X1), profitabilitas (X2) dan CSR (X3) secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak (Y).

4.4.4 Uji Regresi Parsial (Uji Statistik T)

Uji regresi parsial (Uji T) dilakukan untuk menguji hipotesis 1 samai dengan hipotesis 3. Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi apakah secara parsial terdapat pengaruh antara variabel dependen (kebijakan hutang, profitabilitas dan CSR terhadap variabel independen (agresivitas pajak).

Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh antara kebijakan hutang, profitabilitas dan CSR terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam ISSI secara parsial. Berikut tabel yang menampilkan hasil dari dilakukannya uji T:

Tabel 11

Hasil Uji Regresi Parsial (Uji T)

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,133	,095		-1,399	,171		
	X1	,387	,185	,308	2,090	,045	,703	1,423
	X2	,171	,230	,099	1,757	,049	,861	1,162

	X3	,656	,172	,542	3,808	,001	,755	1,325
a. Dependent Variable: Y								

Sumber: Data sekunder yang diolah (SPSS'19)

Tabel 11 menunjukkan hasil atas pengolahan data dari uji regresi parsial, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian pada variabel kebijakan hutang (X1)

   Pada kebijakan hutang (X1) menunjukkan bahwa nilai T_{hitung} sebesar 2,090 dan nilai siginifikannya sebesar 0,045 dengan menggunakan batas signifikannya atau *p-value* 0,05 (α = 0,05) sedangkan T_{tabel} dalam penelitian ini 1,692. Hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai (T_{hitung}) 2,090 > (T_{tabel}) 1,692 dengan nilai signifikan 0,045 < α 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan hutang (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak (Y).

2. Pengujian pada variabel profitabilitas (X2)

   Dalam variabel profitabilitas (X2) diperoleh nilai T_{hitung} sebesar 1,757 dan nilai siginifikannya yaitu 0,463 dengan batas signifikan atau *p-value* 0,05 (α = 0,05) dan T_{tabel} sebesar 1,692. Hal ini artinya bahwa nilai (T_{hitung}) 1,757 > (T_{tabel}) 1,692 dan nilai siginifikan 0,049 < α 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas (X2) berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Y).

3. Pengujian pada variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) (X3)

   Pada variabel CSR menunjukkan bahwa nilai T_{hitung} sebesar 3,808 sedangkan nilai dari T_{tabel} yaitu 1,692. Sedangkan perolehan dari nilai signifikan yaitu 0,001 dengan batas signifikannya atau *p-value* yaitu 0,05 (α = 0,05). Hal tersebut berarti bahwa nilai (T_{hitung}) 3,808 > (T_{tabel})1,692 dan nilai signifikan 0,001 < 0,05. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel CSR (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak (Y).

4.4.5 Pembahasan Hasil Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendeteksi apakah terdapat pengaruh antara variabel kebijakan hutang (X1), profitabilitas (X2) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (X3) terhadap agresivitas pajak (Y) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Index Saham Syariah Indonesia (ISSI). Peneliti dalam melakukan pengolahan data dengan menggunakan bantuan SPSS 2019 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. **Kebijakan hutang berpengaruh agresivitas pajak (Hipotesis pertama)**

   Hipotesis pertama yaitu untuk mendeteksi adanya pengaruh antara kebijakan hutang terhadap agresivitas pajak. Dalam tabel 3 diperoleh hasil nilai mean (0,4352) lebih tinggi dari nilai median (0,4255) maka dapat diindikasikan bahwa rata-rata kebijakan hutang tergolong tinggi, hal ini terjadi karena salah satunya pendanaan dari hutang yang tinggi dikarenakan suatu hal yang mendesak atau keinginan yang mengharuskan perusahaan menambah dana perusahaan.

   Dalam tabel 11 diperoleh hasil bahwa nilai T_{hitung} dalam variabel kebijakan hutang adalah 2,090 sedangkan T_{tabel} yaitu 1,692. Sedangkan nilai signifikannya yaitu 0,045 yang lebih kecil dari 0,05 (0,045 < 0,05) dan memiliki koefisien yang berpengaruh positif yaitu sebesar 0,387. Berdasarkan pernyataan tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) dan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Artinya, apabila nilai kebijakan hutang meningkat maka ETR perusahaan semakin tinggi atau pajak yang dibayar perusahaan semakin tinggi sehingga agresivitas pajaknya rendah. ETR merupakan indikator yang mengukur variabel agresivitas pajak, dimana ETR memiliki sifat yang berlawanan dengan agresivitas pajak. Nilai ETR yang tinggi menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga tinggi dan menandakan jika perusahaan tidak agresif terhadap pajak atau agresivitas pajak rendah. Sehingga hasil dari penelitian ini jika kebijakan hutang mempunyai pengaruh positif

terhadap ETR, maka kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh negatif yang terjadi karena adanya teori *agensi*, dimana dengan adanya kebijakan hutang yang dipilih oleh *agent* (manajemen perusahaan) menjadikan banyak pihak seperti *stakeholder*, pemerintah, OJK dan lainnya akan mengawasi setiap kegiatan perusahaan termasuk dalam membuat laporan keuangan, sehingga *agent* tidak dapat bergerak secara leluasa maka dalam melaporkan pajaknya sesuai dengan keadaan atau kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sehingga walaupun kebijakan hutang tinggi maka pajak yang dibayarpun akan tinggi, sehingga pihak *prinsipal* (pemungut pajak) akan merasa diuntungkan dengan besarnya pajak yang dibayar oleh pihak *agent* (manajemen perusahaan)

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Okta S. Hartadinata dan Heru Tjaraka (2016) tentang pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan hutang dan ukuran perusahaan terhadap tax agressiveness pada perusahaan manufaktur di BEI (2008-2013), yang menyatakan bahwa kebijakan utang berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jeane Atari (2016) yang meneliti tentang pengaruh kepemilikan manajerial dan kebijakan hutang terhadap agresivitas pajak pada perusahaan transportasi yang terdaftar dalam BEI (2011-2013), yang menunjukkan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

2. Profitabilitas berpengaruh agresivitas pajak (Hipotesis 2)

Hipotesis 2 untuk mendeteksi adanya pengaruh antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Dalam tabel 3 diperoleh hasil bahwa nilai mean (0,1284) lebih tinggi dari nilai median (0,1170), maka rata-rata profitabilitas tergolong tinggi. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja dari pengelolaan perusahaan semakin baik, salah satunya

dalam mengelola aset guna untuk memperoleh laba bersih dan memiliki peluang untuk dapat meningkatkan prtumbuhan dari perusahannya.

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan perolehan hasil dalam perhitungan pengolahan data diperoleh bahwa nilai dari T_{hitung} dari variabel profitabilitas yaitu 1,757 sedangkan nilai dari T_{tabel} adalah 1,692. Perolehan nilai signifikan adalah 0,049, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,49 < 0,05) dan memiliki nilai koefisien dengan arah positif yaitu sebesar 0,171.

Pernyataan di atas membuktikan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap ETR (pengukur agresivitas pajak) dan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi ETR perusahaan atau semakin tinggi pajak yang dibayar oleh perusahaan dan agresivitas pajak rendah karena ETR memiliki sifat yang berlawanan dengan agresivitas pajak. Semakin tingginya ETR menandakan bahwa agresivitas pajak pada perusahaan semakin rendah, sehingga kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh *negatif* terhadap agresivitas pajak, atau semakin besar profitabilitas perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak (pajak yang dibayar semakin besar), karena perusahaan dengan profit yang besar dapat diketahui dari laporan keuangannya dan juga terlihat beban pajak yang dibayarkan akan lebih besar.

Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, dalam teori *agensi* terjadi keserasian atau keterkaitan antara pihak *agent* dan *principal* dimana keberhasilan *agent* menjadikan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang besar sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, maka *agent* tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, salah satunya kewajiban terhadap pemerintah (*principa*l) dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hengky Robet (2017) yang berjudul "Pengaruh Corporate Social responsibility dan Profitabilitas rehadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam BEI", yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Tetapi penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarjito Surya dan Siti Noerlaela (2016) yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar dalam BEI, penelitian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

3. *Corporate Social Responsibilty* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Hipotesis 3)

Hipotesis 3 adalah untuk mengetahui adanya pengaruh dari variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak. Dalam tabel 3 diperoleh hasil bahwa nilai mean (0,4072) lebih tinggi dari nilai median (0,3960), sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata *Corporate Social Responsibility* (CSR) tergolong tinggi. Tingginya CSR menunjukkan bahwa kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan juga masyarakat disekitar perusahaan tergolong tinggi.

Berdasarkan tabel 11 hasil dari pengolahan data menunjukkan bahwa nilai dari T_{hitung} sebesar 3,808 sedangkan nilai T_{tabel} 1,692. Hasil dari nilai signifikannya yaitu 0,001, dimana nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05), dan nilai koefisiennya menunjukkan arah positif yaitu sebesar 0,656. Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap ETR (pengukur pajak) dan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan apabila semakin besar perusahaan dalam mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka pajak yang dibayarkan perusahaan juga semakin tinggi atau ETR

perusahaan juga semakin tinggi. Nilai ETR yang tinggi menandakan bahwa pajak yang dibayar juga tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan pajak yang agresif atau agresivitas pajaknya rendahm, dan dapat disimpulkan bahwa ETR memiliki sifat yang berlawanan dengan agresivitas pajak. Sehingga dapat dinyatakan bahwa CSR berpengaruh negaif terhadap agresivitas pajak.

Dalam teori *agensi* CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak karena pihak *agent* (manajemen perusahaan) mengungkapkan CSR yang tinggi maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga perusahaan tersebut akan membayar pajak yang tinggi pula untuk kemakmuran masyarakat dan juga negara, sehingga dengan pembayaran pajak yang tinggi maka dapat menguntungkan *prinsipal* (pemungut pajak/pemerintah).

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Juniati Gunawan (2017) yang meneliti tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* terhadap agresivitas pajak, dan menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Elmi Rakhma Aalin (2018) dengan meneliti pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap agresivitas pajak, dan menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dari pengaruh kebijakan hutang, profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel kebijakan hutang (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap ETR (pengukur agresivitas pajak) dan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak (Y) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam ISSI. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan nilai uji f atau regresi linear berganda dimana nilai signifikan 0,045 < α 0,05 dan koefisien X1 bernilai positif sebesar 0,387 yang artinya bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), dimana semakin tinggi kebijakan hutang maka pajak yang dibayarkan akan semakin tinggi atau ETR semakin tinggi. ETR semakin tinggi menandakan agresivitas perusahaan rendah karena pajak yang dibayar tinggi (ETR memiliki sifat berlawanan dengan agresivitas pajak), sehingga semakin tinggi kebijakan hutang maka semakin rendah agresivitas pajak karena ETRnya tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan hutang berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.
2. Variabel profitabilitas (X2) berpengaruh positif siginifikan terhadap ETR (pengukur agresivitas pajak) dan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak (Y) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam ISSI. Pernyataan tersebut dibuktikan dari hasil nilai uji f atau regresi linear berganda, dalam uji f menunjukkan bahwa nilai siginifikan 0,049 < α 0,05 dan koefisien X2 bernilai positif sebesar 0,171 artinya bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), dimana

semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pajak yang dibayarkan atau ETR semakin tinggi. ETR yang tinggi menandakan bahwa pajak yang dibayarkan tinggi dan agresivitas pajaknya rendah (ETR memiliki sifat berlawanan dengan agresivitas pajak), sehingga semakin tinggi profitabilitas maka agresivitas pajaknya rendah karena ETRnya tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

3. Variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap ETR (pengukur agresivitas pajak) dan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak (Y) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam ISSI. Hal tersebut dapat dibuktikan dari perolehan hasil *uji f* atau regresi linear berganda, hasil dari *uji f* menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,001 < 0,05 dan nilai koefisien X3 sebesar 0,656 yang mengarah ke positif. Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap ETR, artinya semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR maka semakin tinggi pula pajak yang dibayar atau ETR semakin tinggi. ETR yang tinggi menandakan bahwa pajak yang dibayarkan tinggi dan agresivitas pajaknya rendah (ETR memiliki sifat yang berlawanan dengan agresivitas pajak), sehingga semakin tinggi CSR maka agresivitas pajak rendah karena ETRnya tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian ini, peneliti masih mengalami keterbatasan dan kekurangannya. Berikut keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel dependen yaitu kebijakan hutang, profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), sedangkan variabel dependennya yaitu agresivitas pajak.

2. Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam *Indeks Saham Syariah Indonesia* (ISSI), dan hanya terdapat 6 perusahaan.

5.3 Saran

Berdasarkan keterangan dari keterbatasan penelitian tersebut, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel yang belum terdapat dalam penelitian ini.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi dan sampel dengan menambah obyek penelitian sehingga tidak hanya satu obyek.
3. Penelitian berikutnya disarankan dapat menggunakan periode pengamatan terbaru yaitu tahun 2020.

5.4 Penutup

Alhamdulillah hirabbilalamin segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Pengaruh Kebijakan Hutang, Profitabilitas dan Corporate Social Responsability (CSR) terhadap Agresivitas Pajak* ".

Penulis menyadari bahwa selama dalam pengerjaaan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dalam hal pengetahuan dan juga keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Penulis mengharapkan dengan kerendahan hati untuk memberikan kritik dan saran yang membangun guna untuk penyempurnaan sripsi ini.

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi penulis itu sendiri, serta dapat menjadi sumber referensi bagi penulis-penulis selanjutnya yang melakukan pengamatan sesuai dengan tema pada skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anggajaya, Rico Elia. “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Return Saham (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2016),” 2018.

Aqibullah, Razif and Rizq Al. “Pengaruh Thin Capitalizion, Capital Intensity, Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak.” *El. Muhasaba* 8, no. 1 (2017).

Bertin, Dewi Sinta Hermiyanti dan Wandira Ayu. “Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan CSR Terhadap Agresivitas Pajak.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 8, no. 9 (2017): 1–58. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.

Cahyani, Risma. *Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Darussalam. “Realistiskah Target Pajak 2020?” DDTCNews, 2020. https://news.ddtc.co.id/realistiskah-target-pajak-2020-18856?page_y=0.

Fadjar, Muhammad Rizky Andrianto and Achmad. “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak.” *SNAB*, 2017.

Fionasari, Dwi, Enni Savitri, and Andreas Andreas. “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak.” *Sorot* 12, no. 2 (2017): 95. https://doi.org/10.31258/sorot.12.2.4557.

Florentin, Vindry. “Adaro Tersudut Dugaan Penghindaran Pajak.” Koran Tempo, 2017. https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/443777/adaro-tersudut-dugaan-penghindaran-pajak?

Gabrillin, Abba. “KPK Sebut Dari 11.000 Izin Tambang, Hampir 4000 Izin Bermasalah.” Kompas, 2018. www.Kompas.com.

Gunawan, Juniati. “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak.” *Jurnal Akuntansi* 21, no. 3 (2017): 425. https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.246.

Hartadinata, Okta S, and Heru Tjaraka. “Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Agressiveness.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 23, no. 3 (2013): 48–59.

Hengky Robet M Tarigan. “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak,” no. 2004 (2016): 12–20.

Hidayat, Kholid, Arles P Ompusunggu, H Suratno, Magister Akuntansi, Universitas Pancasila, Jl Srengseng Sawah, and Kholid Hidayat. “Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi.” *Jurnal Ilmiah*

Akuntansi Fakultas Ekonomi 2, no. 2 (2016): 39–58.

Inayaturrohmah, Ayu, and Indriyana Puspitosari. "Pengaruh Maqashid Syariah Index, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak." *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 98–115. https://doi.org/10.24952/TIJAROH.V5I1.1691.

Jananti, Ni Wayan Ristiari, and Ery Setiawan. "Pengaruh Agresivitas Pajak Pada Corporate Social Responsibility Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi." *E-Jurnal Akuntansi* 24 (2018): 170. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i01.p07.

Jessica, and Agus Arianto Toly. "Pengaruh Pengungkapan Program Corporate Social Responsibility." *Tax & Accounting Review* 4, no. 1 (2014): 193–203.

Kayo, Edison sutan. "Saham Syariah (ISSI) Di BEI." Saham Syariah, 2017. https://www.sahamok.com/saham-syariah/.

Kismanah, Imas, Siti Masitoh, and Kimsen. "Profitability, Leverage, Sixe of Company Towards Tax Avoidance." *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* 4, no. 1 (2018): 29–36.

Latifah, Nofia Umi. "Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak." *IAIN Surakarta*, no. 1 (2018): 43. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.

Lisa, Sulistyowati and Ariska. "Pengaruh CSR, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak." *Balance* 15, no. 2 (2015).

Mariana, Astri, and Verani Carolina. "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan." *Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2015): 123–36.

Maulana, Hendrik. *Pengaruh ROA, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. Skripsi S1. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019.

Megarani, Novia, Warno Warno, and Muchammad Fauzi. "The Effect of Tax Planning, Company Value, and Leverage on Income Smoothing Practices in Companies Listed on Jakarta Islamic Index." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1, no. 1 (2019): 139. https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3733.

Muriani. *Pengaruh Leverage, Likuiditas, Capital Intensity Dan CSR Terhadap Agresivitas Pajak*. Skripsi. Sultan Syarif KAsim, 2019.

Napitu, Army Thesa, and Christophorus Heni Kurniawan. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014." *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*, no. 2 (2016): 1–24. https://doi.org/10.1016/j.dental.2015.06.006.

Natalya, Desi. "Pengaruh Capital Intensity, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Agresivitas Dengan Kinerja Pasar Sebagai Variabel Moderating." *Media Akuntansi*

Perpajakan 3, no. 1 (2018): 37–55.

Nuryadi. *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Cet. Ke 1. Yogyakarta: Gramasurya, 2017.

Prasista, Putu, and Ery Setiawan. "Pengaruh Profitabilitas Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan." *E-Jurnal Akuntansi* 17, no. 3 (2016): 2120–44.

Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2008.

Putra, Ahmad Toha. *Al-Quran Dan Terjemahannya (Transliterasi Arab-Latin) Model Kanan Kiri*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 2012.

Qurrota A'yun. *Pengaruh Corporate Social Responsibilitu, Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak*. Magelang: UMM, 2019.

Ramila, Prima Aprilyani Rambe, and Sri Ruwanti. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2016." *Jurnal Ekonomi UMRAH* 15, no. 2 (2016): 1–15.

Rejeki, Desi. *Pengaruh Manajemen Laba, CSR Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak*. Semarang: UNNES, 2018.

Reminda, Azzahra Dita. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas , Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak." *JOM Fekon* Vol. 4, no. 2 (2017): 4279–93.

Renny Selviani, Joko Supriyanto, Haqi Fadillah. "Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2017." *Akuntansi*, 2019, 1–15.

Rinaldi, and Charoline Cheisviyanny. "Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013)." *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, no. c (2015): 472–83. http://fe.unp.ac.id/.

Rosandya, Rindy. "Sekitar 60% Perusahaan Tambang Tak Bayar Pajak." Neraca, 2015. https://www.neraca.co.id/articel/30371.

Sapitri, Endang. *Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang*. Lampung: Universitas Raden Intan, 2018.

Sari, Nur Amalia. "Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi (." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2018.

Shintya Devi, Dewa Ayu Nyoman, and Luh Gede Krisna Dewi. "Pengaruh Profitabilitas Pada

Agresivitas Pajak Dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Moderasi." *E-Jurnal Akuntansi* 27 (2019): 792. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i01.p29.

Sofi, Nurillah. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang Dengan Kebijakan Deviden Sebagai Variabel Moderasi*. Malang: UIN Malik Ibrahim, 2018.

Surya, Sarjito, and Siti Noerlaela. "Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak." *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi* VII, no. 1 (2018): 101–18.

Wahyu, Bani Nugraha and Meiranto. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak." *Jurnal Akuntansi* 4, no. 4 (2015): 1–15.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Sampel Perusahaan

Sampel Perusahaan

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	PTBA	PT. Bukit Asam Tbk
2	ITMG	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
3	ELSA	PT. Elnusa Tbk
4	ADRO	PT. Adaro Energy Tbk
5	TOBA	PT. Toba Bara Sejahtera Tbk
6	DSSA	PT. Dian Swastika Tbk

LAMPIRAN 2: Item Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Indikator-indikator GRI Standard Disclosure G4

KATEGORI	KODE	KETERANGAN
KATEGORI EKONOMI		
Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim.
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti.
	EC4	Bantuan finansial yang diteriam dari pemerintah.
Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula *(entry level*) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan.
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang diperkerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasional yang signifikan.
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastuktur dan jasa yang diberikan.
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan termasuk besarnya dampak.
Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingann dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan.
KATEGORI LINGKUNGAN		
Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume.
	EN2	Persentase bahan yang digunakan merupakan bahan input daur ulang.
Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi di luar organisasi.
	EN5	Intensitas energi.
	EN6	Pengurangan konsumsi energi.
Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi.
	EN8	Total pengambilan berdasarkan sumber.

	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi pleh pengambilan air.
	EN10	Presentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali.
Keaneragaman Hayati	EN11	Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keaneragaman hayati yang tinggi di luar kawasan lindung.
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk,, dan jasa terhadap keaneragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keaneragaman hayati yang tinggi di luar kawasan lindung.
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan.
	EN14	Jumlah total spesies dalam iucn red dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan.
Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
	EN16	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) energi tidak langsung (cakupan 2)
	EN17	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tidak langsung lainnya (cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi Gas Rumahh Kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
	EN20	Emisi Bahan Perusak Ozon (BPO)
	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
Efluen dan Lembah	EN22	Otal air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tumapahan signifikan

	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel2 Lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah dan presentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keaneragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi.
Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa.
	EN28	Presentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori.
Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undanng-undang dan peraturan lingkungan.
Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutann tenaga kerja.
Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis.
Asesmen pemasok Atas Lingkungan	EN32	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan.
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
KATEGORI SOSIAL SUB-KATEGORI : PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		

Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat pengkrekutan karyawan baru, dan turnover karyawan menurut kelompok unsur, gender, dan wilayah.
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purna waktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu berdasarkan lokasi operasi yang signifikan.
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan menurut gender.
Hubungan Industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional,termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama.
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	LA5	Presentase total kerja yangg diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja.
	LA6	Jenis dan tingka cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender.
	LA7	Perkerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka.
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja.
Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata pertahun perkaryawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan.
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti.
	LA11	Presentase karyawan yang menerima

		review kinerja dan pengembangan karier secara reguler menurut gender dan kategori karyawan.
Keberagaman dan kesetaraan Peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan perkategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya.
	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan berdasarkan lokasi operasional yang signifikan.
Asemen Pemasok Terkait Praktek Ketenagakerjaan	LA14	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kritera praktek ketenagakerjaan.
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktek ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktek ketenagakerjaan yang diajukan dan ditangani.
SUB-KATEGORI : HAK ASAI MANUSIA		
Investasi	HR1	Jumlah total dan presentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan usul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia.
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi termasuk presentase karyawan yang dilatih.
Non Diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil.
Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan

		kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
Pekerja Anak	HR5	Operasi dan pemasok yang teridentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif.
Pekerja Paksa atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang teridentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja.
Praktek Pengaman	HR7	Presentase petugas pengamanan yanng dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yanng relevan dengan operasi.
Asesmen	HR9	Jumlah total dan presentase operasii yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia.
Asesmen pemasok atas Hak Asasi Manusia	HR10	Presentase penapisanpe pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
Mekanisme Pengaduan Masalahh Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yangg diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduann formal.
SUB-KATEGORI MASYARAKAT		
Masyarakat Lokal	SO1	Presentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan.
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal.

Anti Korupsi	SO3	Jumlah total dan presentase operasi yang dinilai terhadap resiko terkait dengan koupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi.
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi.
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.
Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima –penerima manfaat,
Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trustm serta praktek monopoli dan hasilnya.
Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap Undang-undang dan peraturan
Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO9	Presentase penapisan pemasok baruu menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yangg diajukan, ditangani,, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
SUB-KATEGORI: TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK		
Kesehatan Keselamatan Pelanggan	PR1	Presentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yangg dinilai uuntuk peningkatan.
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup menurut jenis hasil.
Pelabelan Produk dan	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang

Jasa		diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta presentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis.
	PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan iinformasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil.
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan.
Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan.
	PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi dan sponsor menurut jenis hasil.
Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan.
Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap Undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.

Sumber: *Global Reporting Initiative*

LAMPIRAN 3: Tabulasi Hasil Perhitungan Data

Kebijakan Hutang (DAR)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
PTBA	0,29409	0,32695	0,37237	0,43196	0,45025	0,42633
ITMG	0,26846	0,32781	0,29479	0,24993	0,71608	0,32497
ELSA	0,47440	0,41665	0,37143	0,31334	0,40211	0,39162
ADRO	0,44811	0,39060	0,39962	0,41950	0,43732	0,49174
TOBA	0,58380	0,57037	0,49819	0,43520	0,45066	0,52645
DSSA	0,55953	0,55318	0,46864	0,42516	0,44049	0,35639

Profitabilitas (ROA)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
PTBA	0,20903	0,28127	0,27597	0,14518	0,15768	0,16244
ITMG	0,15376	0,25463	0,26648	0,15870	0,11834	0,20058
ELSA	0,06859	0,06219	0,06722	0,09981	0,11520	0,13183
ADRO	0,09131	0,11627	0,13648	0,08387	0,04699	0,05067
TOBA	0,09906	0,19383	0,17281	0,09933	0,13852	0,17929
DSSA	0,03576	0,05737	0,06992	0,04374	0,06444	0,00889

Corporate Social Responsibility (CSR)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
PTBA	0,40659	0,37363	0,29670	0,21978	0,307692	0,373626
ITMG	0,34066	0,37363	0,417582	0,32967	0,881364	0,296703
ELSA	0,47253	0,428571	0,483516	0,340659	0,472527	0,494505
ADRO	0,46154	0,384615	0,461538	0,406593	0,384615	0,43956
TOBA	0,37363	0,32967	0,472527	0,406593	0,406593	0,340659
DSSA	0,45055	0,395604	0,384615	0,450549	0,384615	0,395604

Agresivitas Pajak (ETR)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014

PTBA	0,25934	0,24679	0,25617	0,26304	0,25574	0,22791
ITMG	0,31955	0,29564	0,30203	0,31919	0,85528	0,23544
ELSA	0,23613	0,21458	0,23168	0,24444	0,25209	0,25301
ADRO	0,33991	0,41778	0,42366	0,37660	0,46071	0,43692
TOBA	0,30418	0,30008	0,31274	0,43863	0,34234	0,33576
DSSA	0,46121	0,37861	0,27761	0,33663	0,07188	0,23391

LAMPIRAN 4: Hasil Pengujian SPSS

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Statistics					
		Kebijakan Hutang (X1)	Profitabilitas (X2)	CSR (X3)	Agresivitas Pajak (Y)
N	Valid	36	36	36	36
	Missing	0	0	0	0
Mean		,4352	,1284	,4072	,3201
Median		,4255	,1170	,3960	,3010
Mode		,25[a]	,10[a]	,37[a]	,26[a]
Std. Deviation		,09815	,07132	,10179	,12323
Variance		,010	,005	,010	,015
Range		,47	,27	,66	,78
Minimum		,25	,01	,22	,07
Maximum		,72	,28	,88	,86
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown					

Hasil dari Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,08614320
Most Extreme Differences	Absolute	,095
	Positive	,095
	Negative	-,074
Test Statistic		,569
Asymp. Sig. (2-tailed)		,902
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.		

Grafik P-P Plot

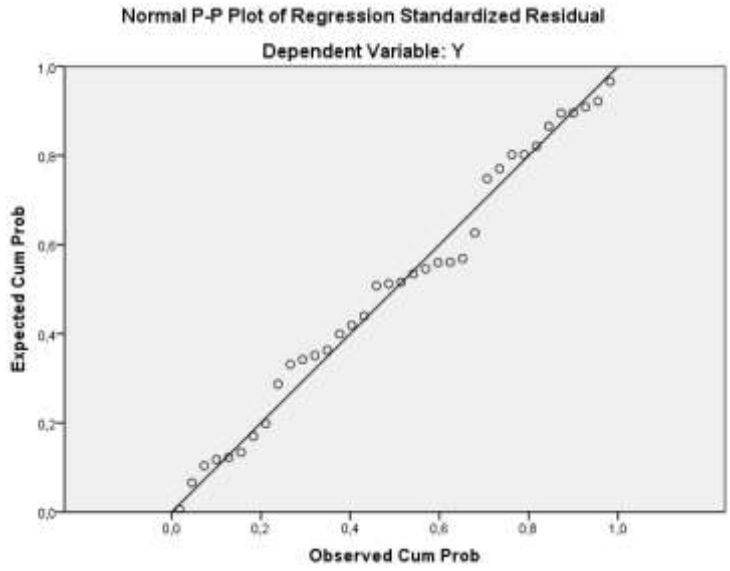

Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients[a]			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	,703	1,423
	X2	,861	1,162
	X3	,755	1,325
a. Dependent Variable: Y			

Hasil dari Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value[a]	,00313
Cases < Test Value	18
Cases >= Test Value	18
Total Cases	36
Number of Runs	13
Z	-1,860
Asymp. Sig. (2-tailed)	,063

a. Median

Hasil dari Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Gletser

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,088	,052		1,678	,103
	X1	-,087	,101	-,159	-,856	,398
	X2	-,372	,111	-,330	-2,359	,051
	X3	,134	,094	,256	1,424	,164
a. Dependent Variable: Abs_RES						

Grafik Scatterplot

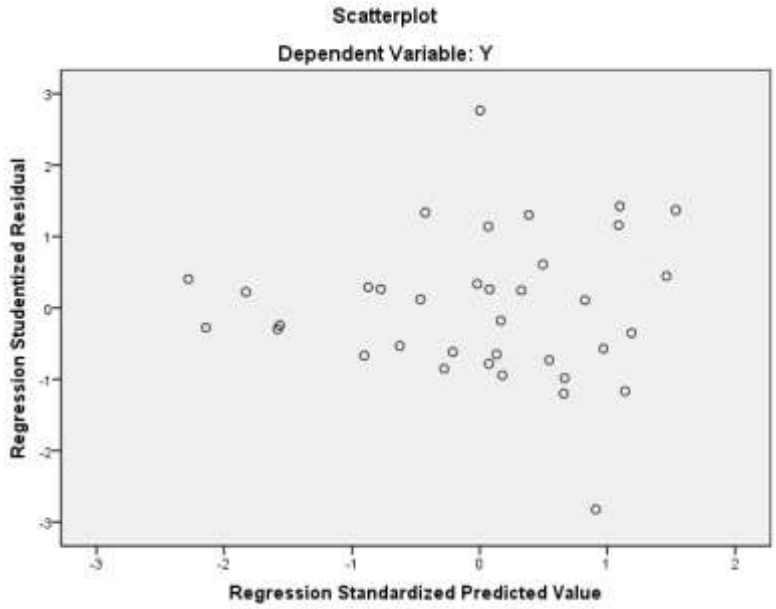

Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,133	,095		-1,399	,171
	X1	,387	,185	,308	2,090	,045
	X2	,171	,230	,099	1,757	,049
	X3	,656	,172	,542	3,808	,001

a. Dependent Variable: Y

Hasil dari Uji Koefisien determinan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,715[a]	,511	,465	,090

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variabel: Y

Hasil Uji Signifikan Simultan

ANOVA[b]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,272	3	,091	11,160	,000[a]
	Residual	,260	32	,008		
	Total	,531	35			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Hasil Uji Regresi Parsial (Uji T)

Coefficients[a]								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,133	,095		-1,399	,171		
	X1	,387	,185	,308	2,090	,045	,703	1,423
	X2	,171	,230	,099	1,757	,049	,861	1,162
	X3	,656	,172	,542	3,808	,001	,755	1,325

LAMPIRAN 5: Tabel F

Table of F-statistics P=0.05

df2 \df1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	35	40	45	50	60	70	80	100	200	500	1000	>1000	df1/df2
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70	8.69	8.68	8.67	8.67	8.66	8.65	8.64	8.63	8.62	8.62	8.60	8.59	8.59	8.58	8.57	8.57	8.56	8.55	8.54	8.53	8.53	8.54	3
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86	5.84	5.83	5.82	5.81	5.80	5.79	5.77	5.76	5.75	5.75	5.73	5.72	5.71	5.70	5.69	5.68	5.67	5.66	5.65	5.64	5.63	5.63	4
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62	4.60	4.59	4.58	4.57	4.56	4.54	4.53	4.52	4.50	4.50	4.48	4.46	4.45	4.44	4.43	4.42	4.42	4.41	4.39	4.37	4.37	4.36	5
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94	3.92	3.91	3.90	3.88	3.87	3.86	3.84	3.83	3.82	3.81	3.79	3.77	3.76	3.75	3.74	3.73	3.72	3.71	3.69	3.68	3.67	3.67	6
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51	3.49	3.48	3.47	3.46	3.44	3.43	3.41	3.40	3.39	3.38	3.36	3.34	3.33	3.32	3.30	3.29	3.29	3.27	3.25	3.24	3.23	3.23	7
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22	3.20	3.19	3.17	3.16	3.15	3.13	3.12	3.10	3.09	3.08	3.06	3.04	3.03	3.02	3.01	2.99	2.99	2.97	2.95	2.94	2.93	2.93	8
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01	2.99	2.97	2.96	2.95	2.94	2.92	2.90	2.89	2.87	2.86	2.84	2.83	2.81	2.80	2.79	2.78	2.77	2.76	2.73	2.72	2.71	2.71	9
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85	2.83	2.81	2.80	2.79	2.77	2.75	2.74	2.72	2.71	2.70	2.68	2.66	2.65	2.64	2.62	2.61	2.60	2.59	2.56	2.55	2.54	2.54	10
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72	2.70	2.69	2.67	2.66	2.65	2.63	2.61	2.59	2.58	2.57	2.55	2.53	2.52	2.51	2.49	2.48	2.47	2.46	2.43	2.42	2.41	2.41	11
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62	2.60	2.58	2.57	2.56	2.54	2.52	2.51	2.49	2.48	2.47	2.44	2.43	2.41	2.40	2.38	2.37	2.36	2.35	2.32	2.31	2.30	2.30	12
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53	2.51	2.50	2.48	2.47	2.46	2.44	2.42	2.41	2.39	2.38	2.36	2.34	2.33	2.31	2.30	2.28	2.27	2.26	2.23	2.22	2.21	2.21	13
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46	2.44	2.43	2.41	2.40	2.39	2.37	2.35	2.33	2.32	2.31	2.28	2.27	2.25	2.24	2.22	2.21	2.20	2.19	2.16	2.14	2.14	2.13	14
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40	2.38	2.37	2.35	2.34	2.33	2.31	2.29	2.27	2.26	2.25	2.22	2.20	2.19	2.18	2.16	2.15	2.14	2.12	2.10	2.08	2.07	2.07	15
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35	2.33	2.32	2.30	2.29	2.28	2.25	2.24	2.22	2.21	2.19	2.17	2.15	2.14	2.12	2.11	2.09	2.08	2.07	2.04	2.02	2.02	2.01	16
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31	2.29	2.27	2.26	2.24	2.23	2.21	2.19	2.17	2.16	2.15	2.12	2.10	2.09	2.08	2.06	2.05	2.03	2.02	1.99	1.97	1.97	1.96	17
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27	2.25	2.23	2.22	2.20	2.19	2.17	2.15	2.13	2.12	2.11	2.08	2.06	2.05	2.04	2.02	2.00	1.99	1.98	1.95	1.93	1.92	1.92	18
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23	2.21	2.20	2.18	2.17	2.16	2.13	2.11	2.10	2.08	2.07	2.05	2.03	2.01	2.00	1.98	1.97	1.96	1.94	1.91	1.89	1.88	1.88	19
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.23	2.20	2.18	2.17	2.15	2.14	2.12	2.10	2.08	2.07	2.05	2.04	2.01	1.99	1.98	1.97	1.95	1.93	1.92	1.91	1.88	1.86	1.85	1.84	20
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15	2.13	2.11	2.10	2.08	2.07	2.05	2.03	2.01	2.00	1.98	1.96	1.94	1.92	1.91	1.89	1.88	1.86	1.85	1.82	1.80	1.79	1.78	22
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11	2.09	2.07	2.05	2.04	2.03	2.00	1.98	1.97	1.95	1.94	1.91	1.89	1.88	1.86	1.84	1.83	1.82	1.80	1.77	1.75	1.74	1.73	24
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07	2.05	2.03	2.02	2.00	1.99	1.97	1.95	1.93	1.91	1.90	1.87	1.85	1.84	1.82	1.80	1.79	1.78	1.76	1.73	1.71	1.70	1.69	26
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04	2.02	2.00	1.99	1.97	1.96	1.93	1.91	1.90	1.88	1.87	1.84	1.82	1.80	1.79	1.77	1.75	1.74	1.73	1.69	1.67	1.66	1.66	28
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01	1.99	1.98	1.96	1.95	1.93	1.91	1.89	1.87	1.85	1.84	1.81	1.79	1.77	1.76	1.74	1.72	1.71	1.70	1.66	1.64	1.63	1.62	30
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.08	2.04	2.01	1.99	1.96	1.94	1.92	1.91	1.89	1.88	1.85	1.83	1.82	1.80	1.79	1.76	1.74	1.72	1.70	1.68	1.66	1.65	1.63	1.60	1.57	1.57	1.56	35
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92	1.90	1.89	1.87	1.85	1.84	1.81	1.79	1.77	1.76	1.74	1.72	1.69	1.67	1.66	1.64	1.62	1.61	1.59	1.55	1.53	1.52	1.51	40
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89	1.87	1.86	1.84	1.82	1.81	1.78	1.76	1.74	1.73	1.71	1.68	1.66	1.64	1.63	1.60	1.59	1.57	1.55	1.51	1.49	1.48	1.47	45
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87	1.85	1.83	1.81	1.80	1.78	1.76	1.74	1.72	1.70	1.69	1.66	1.63	1.61	1.60	1.58	1.56	1.54	1.52	1.48	1.46	1.45	1.44	50
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84	1.82	1.80	1.78	1.76	1.75	1.72	1.70	1.68	1.66	1.65	1.62	1.59	1.57	1.56	1.53	1.52	1.50	1.48	1.44	1.41	1.40	1.39	60
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81	1.79	1.77	1.75	1.74	1.72	1.70	1.67	1.65	1.64	1.62	1.59	1.57	1.55	1.53	1.50	1.49	1.47	1.45	1.40	1.37	1.36	1.35	70
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79	1.77	1.75	1.73	1.72	1.70	1.68	1.65	1.63	1.62	1.60	1.57	1.54	1.52	1.51	1.48	1.46	1.45	1.43	1.38	1.35	1.34	1.33	80
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77	1.75	1.73	1.71	1.69	1.68	1.65	1.63	1.61	1.59	1.57	1.54	1.52	1.49	1.48	1.45	1.43	1.41	1.39	1.34	1.31	1.30	1.28	100
200	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72	1.69	1.67	1.66	1.64	1.62	1.60	1.57	1.55	1.53	1.52	1.48	1.46	1.43	1.41	1.39	1.36	1.35	1.32	1.26	1.22	1.21	1.19	200
500	3.86	3.01	2.62	2.39	2.23	2.12	2.03	1.96	1.90	1.85	1.81	1.77	1.74	1.71	1.69	1.66	1.64	1.62	1.61	1.59	1.56	1.54	1.52	1.50	1.48	1.45	1.42	1.40	1.38	1.35	1.32	1.30	1.28	1.21	1.16	1.14	1.12	500
1000	3.85	3.00	2.61	2.38	2.22	2.11	2.02	1.95	1.89	1.84	1.80	1.76	1.73	1.70	1.68	1.65	1.63	1.61	1.60	1.58	1.55	1.53	1.51	1.49	1.47	1.43	1.41	1.38	1.36	1.33	1.31	1.29	1.26	1.19	1.13	1.11	1.08	1000
>1000	3.84	3.00	2.61	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.79	1.75	1.72	1.69	1.67	1.64	1.62	1.61	1.59	1.57	1.54	1.52	1.50	1.48	1.46	1.42	1.40	1.37	1.35	1.32	1.30	1.28	1.25	1.17	1.11	1.08	1.03	>1000
df2/df1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	35	40	45	50	60	70	80	100	200	500	1000	>1000	df1 \df2

LAMPIRAN 6: Tabel T

t Table

cum. prob	$t_{.50}$	$t_{.75}$	$t_{.80}$	$t_{.85}$	$t_{.90}$	$t_{.95}$	$t_{.975}$	$t_{.99}$	$t_{.995}$	$t_{.999}$	$t_{.9995}$
one-tail	0.50	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	0.0005
two-tails	1.00	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.002	0.001
df											
1	0.000	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	318.31	636.62
2	0.000	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	0.000	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	0.000	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.000	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.000	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.000	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.000	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.000	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.000	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	0.000	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	0.000	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	0.000	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	0.000	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	0.000	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	0.000	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	0.000	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	0.000	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	0.000	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	0.000	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	0.000	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	0.000	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	0.000	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	0.000	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	0.000	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	0.000	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	0.000	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	0.000	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	0.000	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	0.000	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
40	0.000	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
60	0.000	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
80	0.000	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	3.195	3.416
100	0.000	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626	3.174	3.390
1000	0.000	0.675	0.842	1.037	1.282	1.646	1.962	2.330	2.581	3.098	3.300
z	0.000	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291
	0%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	98%	99%	99.8%	99.9%
	Confidence Level										

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Afiyatul Khafifah

Tempat & Tgl. Lahir : Temanggung, 14 Agustus 1999

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Joho Utara RT 04/02 Joho Kec./Kab. Temanggung

No. Telepon : 089673517286

Email : afi.khafifah14@gmail.com

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan Formal :

No.	Pendidikan	Tahun
1	SD Negeri Joho Temanggung	2005 - 2011
2	SMP Negeri 6 Temanggung	2011 - 2014
3	MA Negeri Temanggung	2014 - 2017
4	UIN Walisongo Semarang	2017- Selesai